



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(DIISI NAMA PERANGKAT DAERAH)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 merupakan sebuah dokumen perencanaan tingkat propinsi yang bersifat menyeluruh, Rencana Strategis disusun berpedoman dengan RPJMD dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menampung dinamika pendidikan yang berkembang saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan baik nasional maupun global. Kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sebagai sebuah dokumen yang utuh, Rencana Strategis Dinas pendidikan Sumatera Selatan tidak berdiri sendiri atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan tingkat Propinsi, Rencana Strategis merupakan bagian integral dari rencana pengembangan/pembangunan Propinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan sektor-sektor lain.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini disusun secara komprehensif dan menyeluruh untuk memberikan pegangan kepada para perencana di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan dalam menyusun rencana pengembangan pendidikan di Propinsi ini. Selain sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis mempunyai manfaat lain yang bersifat informatif bagi berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan.

Kami sadari bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu diperbaharui, dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan masukan untuk penyempurnaannya.

Palembang, 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan



Mondyaboni S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd
Pembina TK.1, IV/b
NIP. 1979081220090920001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	13
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANANAN, PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2 Sumber Data Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	42
2.5 Mitra Perangkat Daerah	43
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	44
2.7 Kerjasama Daerah	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra	60
3.2 Sasaran Renstra	60
3.3 Strategi Perangkat Daerah	61
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	69
BAB IV	
4.1 PROGRAM , KEGIATAN ,SUB KEGIATAN DAN KINERJA	73
4.2 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
4.3 Uraian Program	92
4.4 Uraian Kegiatan	92
4.5 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja	93
4.6 Uraian Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Target Keberhasilan	93
	94
BAB V PENUTUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap pendidikan. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan nasional. Secara lebih rinci, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah serta pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan yang teruang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan menjadi tiga jenis, antara lain : urusan pemerintahan absolut (kewenangan penuh

pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkruen (dibagi antara pusat dan daerah) dan urusan pemerintah umum (kewenangan daerah).

Dalam pengelolaan pendidikan terutang di dalam Peta Jalan Pendidikan tahun 2025-2045 sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan dimana rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN) serta renstra Kementerian/lembaga dan renstra Pemerintah Daerah berpedoman pada peta jalan ini untuk memastikan pembangunan pendidikan terlaksana secara berkesinambungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang kemudian diturunkan ke dalam rencana pembanguna jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun setiap 5 (lima) tahun yang terdiri dari 7 (tujuh) misi, dengan penjabaran misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dengan tujuan yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 8 (delapan) sasaran yang harus dicapai.

2. Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan tujuan yaitu Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dengan 4 (empat) sasaran yang harus dicapai

3. MISI 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim

Dengan tujuan yaitu terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air dengan 4 (empat) sasaran yang

harus dicapai serta tujuan meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dengan 1 (satu) sasaran yang harus dicapai

4. MISI 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan

Dengan tujuan yaitu meningkatnya kualitas konektivitas Daerah, dengan 3 (tiga) sasaran, tujuan meningkatnya akses infrastruktur dasar masyarakat dengan 3 (tiga) sasaran dan tujuan meningkatnya pengelolaan bencana dengan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai

5. MISI 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

Dengan tujuan yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai

6. MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Dengan tujuan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan, dengan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai

7. Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal

Dengan tujuan yaitu mempertahankan stabilitas sosial, dengan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai

Pembangunan bidang pendidikan tertuang pada misi I dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator dan 8 (delapan) sasaran pada program strategis yang ke 4 (empat) yaitu Pendidikan yang berkeadilan, dengan penjabaran Program Strategis sebagai berikut :

1. Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas
2. Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal
3. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru

4. Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
5. Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini



Sumber : Bappeda Prov. Sumsel tahun 2025

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai arah kebijakan dalam pengelolaan pendidikan yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2025-2029, dengan visi yang akan dicapai adalah **“Sumatera Selatan maju terus untuk semua”**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang disusun untuk tahun 2025–2029 juga harus bersinergi dengan renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat selaras dalam mengimpelementasikan arah dan kebijakan dalam pendidikan, dimana di dalam Renstra KL berfokus pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas, dan penguatan pendidikan karakter, dengan prioritas utama, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Wajib Belajar 13 tahun

Kemendikdasmen berkomitmen untuk mewujudkan Wajib Belajar 13 tahun, termasuk penambahan satu tahun pendidikan

prasekolah, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pemerataan kesempatan pendidikan

2. Peningkatan Kualitas

Prioritas lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, seperti peningkatan kompetensi guru, pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan talenta dan prestasi, serta penguatan pendidikan berbasis literasi, numerasi, sains, teknologi, dan kecerdasan artifisial

3. Penguatan Pendidikan Karakter

Kemendikdasmen juga fokus pada penguatan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan, seperti pendampingan kurikulum, pembelajaran, dan karakter

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk revitalisasi dan penambahan ruang pembelajaran, juga menjadi fokus utama untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas

5. Pendidikan Vokasi

Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) juga menjadi fokus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja

6. Pemerataan Akses

Kemendikdasmen juga berkomitmen untuk pemeratakan akses pendidikan ke seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) dan daerah Papua, melalui berbagai program bantuan dan beasiswa, seperti Program Indonesia Pintar dan beasiswa ADEM.

Program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

1. Pertama, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Pemenuhan sarpras, perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan
3. Sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang berkeadilan

4. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
5. Penguatan karakter dengan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat dan ceria
6. Penguatan karakter dengan pelatihan guru BK dan Ke BK-an
7. Pelajaran mendalam (deep learning)
8. Pelajaran koding dan kecerdasan artifisial
9. Test kemampuan akademik (TKA)
10. Pengembangan talenta dan prestasi
11. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
12. Penguatan Pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi;

Dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan pendidikan yang dituangkan ke dalam program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Langkah dan kebijakan agar terjadi sinkronisasi arah kebijakan, program dan kegiatan ke dalam, RPJMD dan renstra Dinas Pendidikan yang tertuang pada misi I dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator dan 8 (delapan) sasaran pada program strategis yang ke 4 (empat) yaitu Pendidikan yang berkeadilan, dengan penjabaran sasaran sebagai berikut :

1. Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas
2. Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal
3. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru
4. Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
5. Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi

Dalam mempercepat capaian Pendidikan bermutu untuk semua yang sudah selaras dengan arah pendidikan pada Asta Cita, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk mengelakan semua potensi bangsa menyukkseskan pemajuan

pendidikan yang bermutu bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan penyelarasan arah dan kebijakan Pendidikan antara Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Kementerian Pendidikan dasar dan menengah perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya melakukan akselerasi transformasi Pendidikan untuk mencapai Pendidikan untuk semua yang bermutu dan berkualitas dengan membuka akses kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

Renstra Dinas Pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi umum Pendidikan dalam upayanya untuk mengkristalkan peranan pendidikan dengan gambaran umum sebagai berikut:

1. Akses Pendidikan

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu dan biaya. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis Selanjutnya juga sangat diperlukan meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak 4-18 tahun pada Pendidikan khusus dan 16-18 tahun pada Pendidikan menengah serta memberikan akses dan kesempatan yang besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan. Untuk akses jenjang pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dalam upayanya untuk mengurangi anak tidak sekolah (ATS) baik yang putus sekolah dengan

mengoptimalkan peranan Pendidikan non formal, anak tidak melanjutkan dengan upaya biaya Pendidikan yang gratis, ketersediaan daya tampung, pemberian Kartu Indonesia Pintar agar anak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan anak tidak pernah sekolah, ini memang perlu pendataan dengan melibatkan para kepala desa, RT, RW yang ada dilingkungan tersebut agar dapat diberikan hak akan pendidikan pada pendidikan non formal.

2. Pembiayaan Pendidikan

Proses pengalokasian sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan program pendidikan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi sumber-sumber pembiayaan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memastikan tersedianya akses pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan Masyarakat. Kondisi saat ini Masyarakat masih menganggap bahwa biaya Pendidikan mahal, karena itulah perlu peranan pemerintah dalam penyediaan pembiayaan Pendidikan baik melalui dana transfer pusat ataupun APBD agar dapat menghilangkan opini biaya Pendidikan yang mahal.

3. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan sangat erat kaitannya dengan akreditasi dan nilai hasil asesmen nasional yang tertuang di dalam raport mutu pendidikan daerah. Dalam penilaian assesmen nasional terdiri atas penilaian assesmen siswa antara lain nilai literasi, numersi dan survei lingkungan baik guru dan kepala sekolah, pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat;

4. Kondisi Pendidik

Ketersediaan pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran. Saat ini kekurangan pendidik PNS sangat dirasakan penyebabnya adalah pembatasan perekrutan pendidik namun saat ini telah diupayakan perekrutan pendidik melalui jalur P3K serta juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemerataan pendidik. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas pendidik dengan memperkuat mekanisme pelatihan guru, penajaman standar kompetensi guru

5. Kebekerjaan Lulusan

Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat ke bekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi.

Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspektif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari satuan pendidikan

Isu lain yang terkait kebekerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebekerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 terutama untuk mengatasi kebekerjaan tamatan SMK pada dunia usaha dan dunia insdustri;

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan saling melengkapi dan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang baik akan berdampak positif pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa, Kondisi yang dihadapi saat ini memang belum masih terdapat kesenjangan atau belum meratanya kualitas sarana dan prasarana baik baik sekolah negeri maupun sekolah swasta terutama daerah pelosok dibandingkan engan diperkotaan. Pemerintah terus berkomiten dalam peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan agar mutu dan kualitas Pendidikan bisa merata melalui revitalisasi bangunan sekolah, Pembangunan Gedung pengadaan sebagai penjunjang proses pembelajaran baik melalui pendanaan APBD, DAK Fisik atupun melalui Bantuan Pemerintah (Bantah)

7. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh persen) anggaran tersebut adalah anggaran yang dikelola oleh daerah untuk mendukung program

prioritas pemerintah melalui dana alokasi khusus baik DAK fisik maupun non fisik.

Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan, 7 (tujuh) gambaran umum diatas masih menjadi kendala. Untuk menyikapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis serta komitmen dari semua pihak. Sebagai implikasi dari masalah tersebut, perlunya memecahkan masalah tersebut dengan perencanaan yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengurangi permasalahan sehingga bisa mencapai tujuan misi pendidikan tersebut.

Dalam hal ini, perencanaan pendidikan harus akurat, tepat sasaran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dengan mudah dapat mencapai hasil yang di harapkan dengan maksimal. Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan juga melibatkan komponen masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan jangka waktu perencanaan, maka setiap daerah otonom minimal wajib menyusun tiga jenis perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun setiap 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun setiap 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun . Sementara itu masing-masing SKPD harus menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dengan memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Kementrian.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan menetapkan kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029), penetapan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir karena pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini masih menyisakan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut yang tersusun di dalam rencana kerja Dinas Pendidikan untuk setiap tahunnya dalam upaya untuk mencapai apa yang telah tertuang di dalam RJPMD yang diturunkan di dalam Renstra Dinas Pendidikan. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, social, dan fisik peserta didik, sehingga tujuan pembangunan pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Selatan dapat kita wujudkan. Di samping itu berdasarkan konsepsi di atas dan dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan termasuk pembangunan pendidikan, yaitu adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat undang – undang yang menjadi kewenangan masing - masing

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
- h. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- i. Instruksi Kemendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa depan, rencana pembangunan lima tahun kedepan merupakan konsensus dan komitmen bersama untuk menyatukan pandangan, sikap dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan. Salah satu pilar pembangunan di Sumatera Selatan adalah pembangunan sumber daya manusia yang berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu upaya strategis yang harus dilakukan.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk mewujudkan suatu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan acuan dalam melaksanakan program setiap tahun anggaran yang pada akhirnya dapat diharapkan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi :
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi :
 - 2.1 Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat :
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber data perangkat daerah
 - 2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah
 - 2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah
 - 2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
- 2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- 2.2 Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat :
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis
- 3. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, memuat
 - 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
 - 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
 - 3.3 Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
 - 3.4 Penahapan Pembangunan
 - 3.5 Penyajian Lokus
 - 3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
- 4. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat :
 - 4.1 Uraian program
 - 4.2 Uraian kegiatan
 - 4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
 - 4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
 - 4.5 Target keberhasilanpencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah
 - 4.6 Target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- 5. BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daera

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan sebagai salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Perda) Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

b. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

3. Pengelolaan data, pembinaan teknis dan program pembangunan pendidikan nasional;
4. Pengawasan, pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
5. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Untuk membantu tugas dari Dinas Pendidikan UPTD Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. UPTD Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK) dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan pendidikan kejuruan
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan
- 4) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD BPPK
- 5) Pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan UPTD BPPK
- 6) Pelaksanaan pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan UPTD BPPK
- 7) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana UPTD BPPK
- 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD BPPK
- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
- 10) Penyelenggaraan administrasi kearsipan UPTD BPPK

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya

c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan

- d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
2. UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP) dengan fungsi sebagai berikut
- a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:
 - 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 3) Pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 4) Pengembangan kompetensi pendidik di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 5) Pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan; dan
 - 6) Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - b. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
3. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan ketatausahaan
 - 2) Pelayanan pengunjung edukatif
 - 3) Pelaksanaan kerjasama bidang sains dan teknologi
 - 4) Publikasi/promosi, sosialisasi sains dan teknologi
 - 5) Penyediaan sarana pembelajaran sains dan teknologi
 - 6) Pengelolaan hasil penelitian bidang sains dan teknologi
 - 7) Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 8) Pelaksanaan pelayanan rumah pintar
 - b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya
 - c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan
 - d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

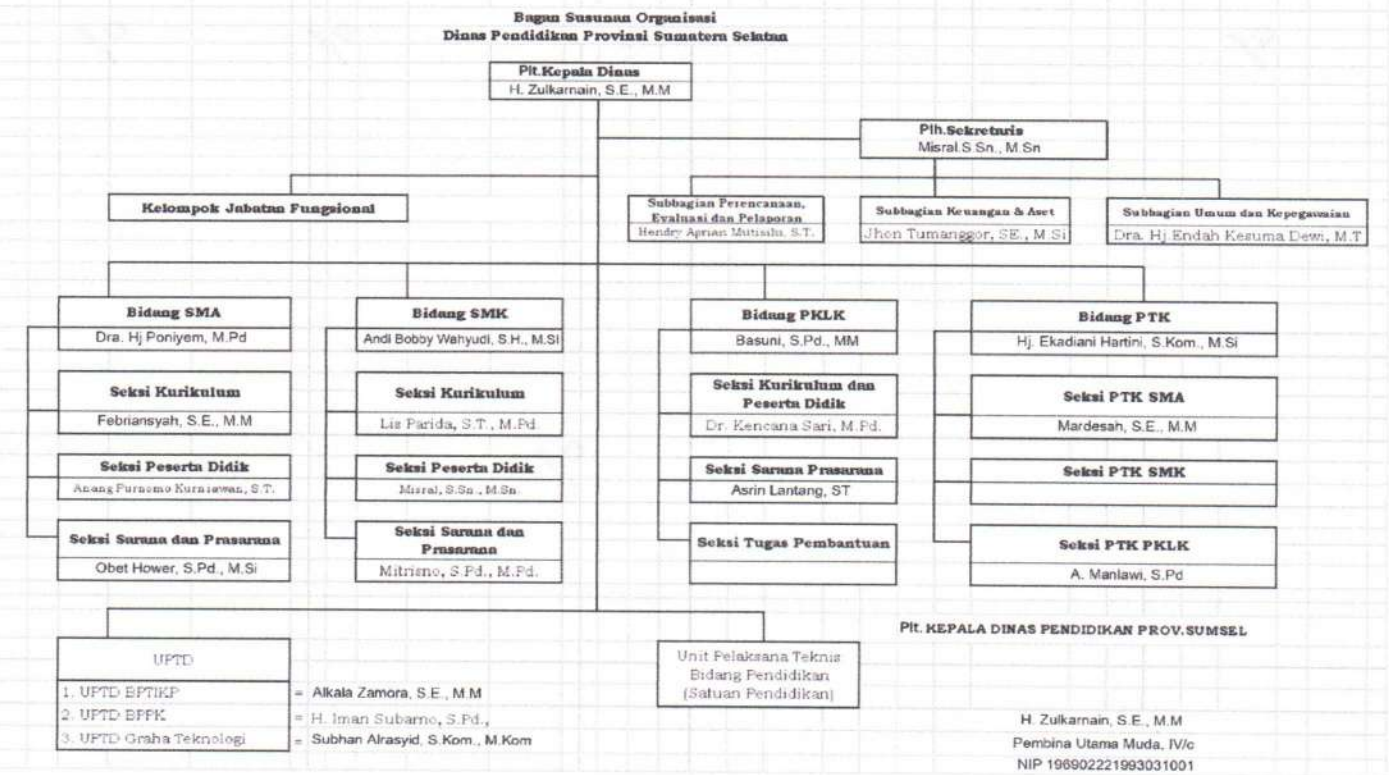
c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 tahun 2016, dengan struktur organisasi terdiri atas :

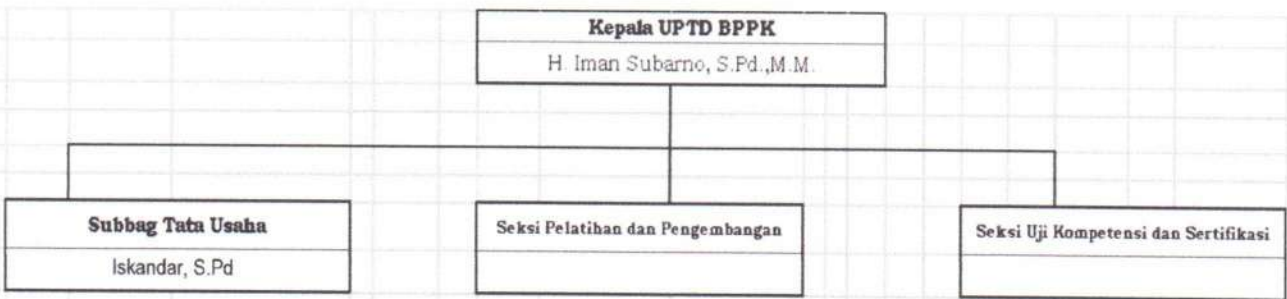
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbag Keuangan dan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Peserta Didik
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
4. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Peserta Didik
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Tugas Perbantuan
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Pada Dinas Pendidikan Sesuai dengan
Pergub 52 tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan



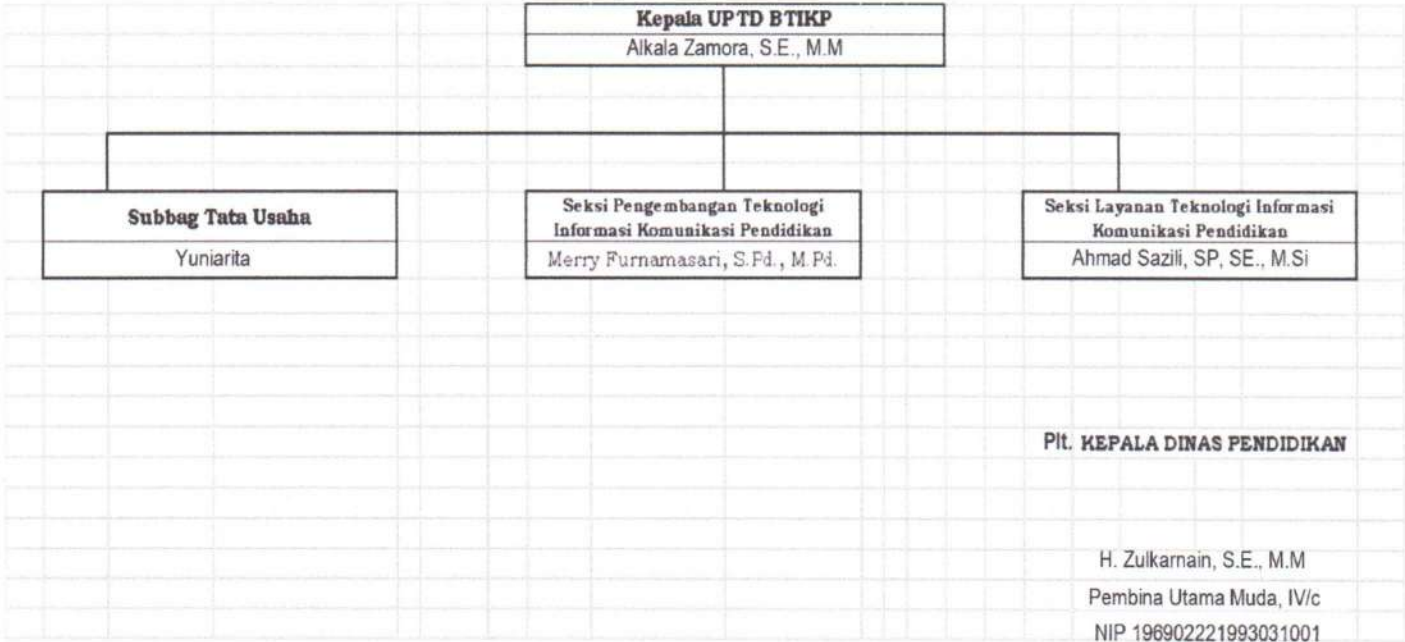
Bagan Struktur Organisasi UPTD Dinas Pendidikan Sesuai dengan
Pergub 15 tahun 2018
UPTD BPPK



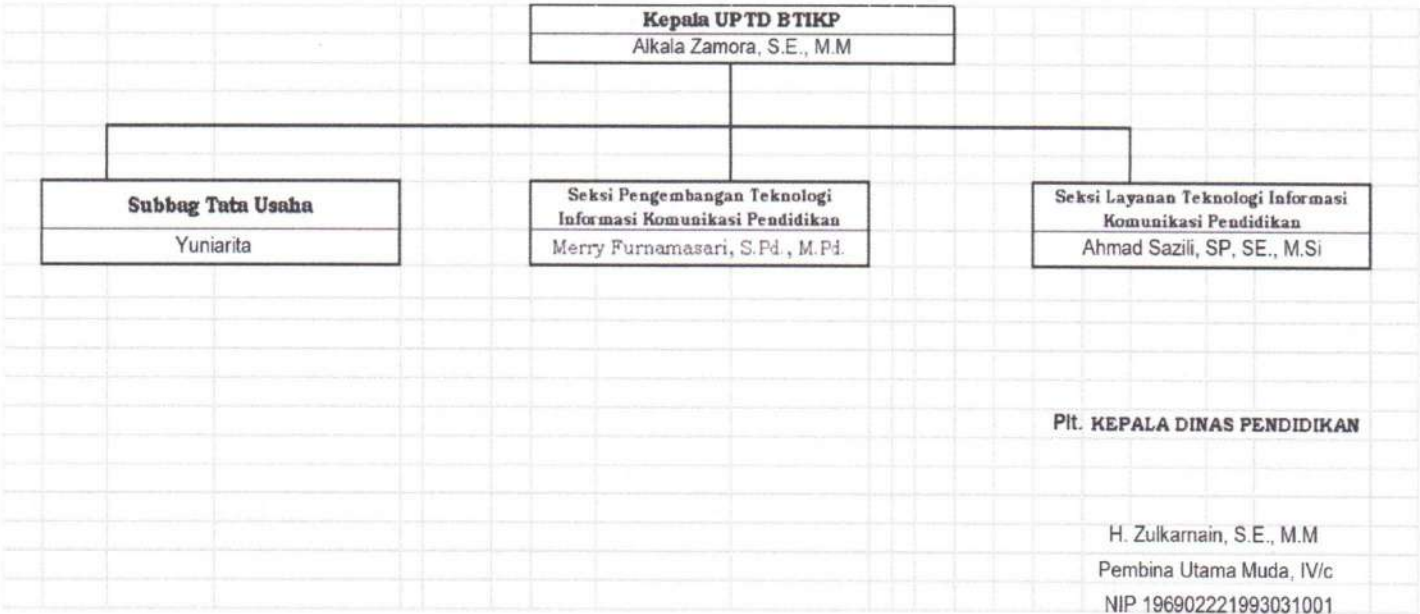
PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. Zulkarnain, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196902221993031001

UPTD BTIKP



UPTD Graha Teknologi Sriwijaya



2.1.2 Sumber data perangkat daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis

Daerah yang bersinergis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing masing perangkat daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang terdapat pada perangkat daerah masing – masing, seperti :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi, pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah institusi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan institusi tersebut itu. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan memberikan kesempatan kepada masing masing daerah untuk meningkatkan SDM masing masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan pemerintah daerah masing masing. Peranan vital dalam peningkatan SDM terletak pada Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan harus mengerahkan segala kemampuan dan potensi SDM yang ada pada Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut disusun di dalam Struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Pendidikan yang bertujuan menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah di provinsi Sumatera Selatan. Sebagai landasan tugas tersebut tetapkan dengan Perda nomor 8 tahun 2008

tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan serta Pergub No 52 Tahun 2016 tentang struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan penjabaran SDM sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas dan satuan Dinas :

- Dinas Pendidikan	=	222 orang
- UPTD BPPK	=	20 orang
- UPTD BTIKP	=	17 orang
- UPTD Graha Teknologi Sriwijaya	=	17 orang
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan	=	15.541 orang
- Pengawas	=	<u>91 orang</u>
Jumlah	=	15.908 orang

b. Sumbert Daya Aset

Aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang masih dikelola adalah:

1. Aset Tidak Bergerak (Gedung bangunan) antara lain:

- a. Gedung Kantor Dinas Pendidikan di Jl. Kapten A. Rivai Palembang;
- b. Rumah Dinas Kepala Dinas di Jalan Demang Lebar Daun Palembang;
- c. Rumah Dinas di Jalan Mayor Ruslan Palembang;
- d. Gudang Buku di Jalan Sako Kenten Palembang;
- e. Gudang Beras di Jalan Kebun Duku Palembang;
- f. Gedung UPTD BTIKP di Jalan KS. Tubun Palembang;
- g. Gedung UPTD BPPK di Jalan Basuki Rahmad Palembang;
- h. Taman Pendidikan Anak Usia Dini Jakabaring Palembang;
- i. Gedung UPTD Graha Teknologi Sriwijaya Jakabaring;
- j. Gedung SMA Negeri sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gedung sekolah yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kab/Kota.

k. Gedung SMK Negeri sebanyak 121 (seratus dua satu) gedung sekolah yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kab/Kota

l. Gedung SLB Negeri sebanyak 16 (enam belas) gedung sekolah yang tersebar di 16 (enam belas) Kab/Kota

2. Aset bergerak (Kendaraan Dinas)

Kendaraan roda 4 (empat)

a. Minibus = 89 unit

b. Bus = 8 unit

c. Pick Up = 3 unit

Kendaraan roda 2 (dua)

Sepeda Motor = 13 unit

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah

Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan yaitu melaksanakan layanan bidang Pendidikan yang tertuang dalam standar pelayanan minimum untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus (SLB).

1. Pelayanan Pendidikan Menengah

Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pada pengelolaan Pendidikan menengah yaitu memberikan jaminan bagi anak usia 16 s.d 18 tahun untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminatif baik pada pendidikan sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan termasuk Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta

2. Pelayanan Pendidikan Khusus dan Inklusi

Untuk Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus untuk memberikan kepastian bagi anak-anak disabilitas pada usia 4 s.d 18 tahun untuk memperoleh pendidikan dan juga melakukan program pendidikan inklusi dimana anak anak berkebutuhan khusus dapat diterima di pendidikan

- 3. Pelayanan terhadap peningkatan sumber daya manusia baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan maupun bagi SDM siswa
- 4. Akses dan pelayanan bagi siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa pembiayaan selama mengenyam pendidikan

Dalam mencapai pelayanan tersebut disusun didalam sasaran strategis, indikator kinerja target dan capaian, dengan penjabaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran berkurangnya orang miskin melalui Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu jumlah siswa yang memperoleh bantuan pendidikan gratis tanpa membayar, dengan capain target dan kinerja sebagai berikut:

Tabel target dan capaian berkurangnya orang miskin melalui pendidikan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Target	Capaian	Keterangan
1	Tahun 2020	300	300	orang
2	Tahun 2021	300	300	orang
3	Tahun 2022	300	300	orang
4	Tahun 2023	300	300	orang
5	Tahun 2024	300	324	orang

Sumber data : Dinas Pendidikan

Grafik target dan capaian berkurangnya orang miskin melalui pendidikanTahun 2020-2024



a) Angka harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut ini target dan capaian angka Harapan Lama Sekolah tahun 2020-2024 di Sumatera Selatan

Tabel Target dan Capaian Harapan Lama Sekolah di Sumsel Tahun 2020-2024

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2020	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,77	12,45
2021	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98	12,54
2022	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,19	12,55
2023	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,4	12,63
2024	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,56	12,64

Sumber data : BPS

Grafik Target dan Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Sumsel
Tahun 2020-2024



b) Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata rata lama sekolah (RLS) dapat didefinisikan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat Sekolah Dasar (SD) diperhitungkan rata-rata lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) angka rata-rata lama sekolah diperhitungkan selama 9 (sembilan) tahun sedangkan tamatan Sekolah Menengah (SMA dan SMK) diperhitungkan angka rata-rata lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berikut ini target dan capaian angka rata rata lama sekolah tahun 2020-2024 di Sumatera Selatan

Tabel Target dan Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Sumsel
Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2020	Rata-rata Lama Sekolah	8,47	8,24
2021	Rata-rata Lama Sekolah	8,63	8,3
2022	Rata-rata Lama Sekolah	8,79	8,37
2023	Rata-rata Lama Sekolah	8,5	8,77
2024	Rata-rata Lama Sekolah	8,57	8,85

Sumber data : BPS

Grafik Target dan Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Sumsel
Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

c) Prosentase APM SMA/K

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM memberikan gambaran tentang seberapa banyak penduduk usia sekolah yang benar-benar mengikuti pendidikan di tingkat yang sesuai dengan usianya

Tabel Target dan Capaian Prosentase Angka Partisipasi Murni
Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2020	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	61,04	60,45
2021	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	62,02	60,53
2022	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	63	61
2023	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	63,98	61,24
2024	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)	70,72	62,70

Sumber : BPS

Grafik Target dan Capaian Prosentase Angka Partisipasi Murni)
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS

d) Prosentase Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sama, berikut ini target dan capaian Prosentase Angka Partisipasi Sekolah di Sumsel tahun2020-2024

Tabel target dan capaian Prosentase Angka Partisipasi sekolah
Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2020	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	75,11	70,91
2021	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	77,13	71,53
2022	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	79,15	70,93
2023	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	71,71
2024	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	70,8

Sumber data : BPS

Grafik target dan capaian Prosentase Angka Partisipasi sekolah
Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS

- e) Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
- Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama untuk semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, di lingkungan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, berikut ini target dan capaian Pendidikan inklusi di Sumsel periode tahun 2020-2024

Tabel target dan capaian sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Target (Sekolah)	Realisasi (Sekolah)
2020	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	94	93
2021	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	95	94
2022	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	96	94
2023	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	97	116
2024	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	98	149

Sumber data : Dinas Pendidikan

Grafik target dan capaian sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pendidikan

- f) Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah
- SPM Pendidikan Menengah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pendidikan menengah. Ini adalah ukuran minimal mutu dan jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi dalam pendidikan menengah, yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan berhak diterima oleh setiap peserta didik. Berikut ini capaian SPM Pendidikan Menengah di Sumsel tahun 2021-2024

Tabel target dan capaian SPM Pendidikan Menengah
Tahun 2021-2024

Tahun	Prosentasi SPM Pendidikan Menengah	Target (%)	Realisasi (%)
2021	Prosentase SPM Pendidikan Menengah	100	51,41
2022	Prosentase SPM Pendidikan Menengah	100	58,14
2023	Prosentase SPM Pendidikan Menengah	100	94,75
2024	Prosentase SPM Pendidikan Menengah	100	98,78

Sumber data : Dinas Pendidikan

Grafik target dan capaian SPM Pendidikan Menengah
Tahun 2020-2024



Sumber data : Dinas Pendidikan

g) Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus

SPM Pendidikan Khusus adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan untuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. SPM ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan pendidikan yang minimal sesuai dengan haknya, serta memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan, berikut ini capaian SPM Pendidikan Khusus tahun

Tabel target dan capaian SPM Pendidikan Khusus
Tahun 2021-2024

Tahun	Prosentase SPM Pendidikan Khusus	Target (%)	Realisasi (%)
2021	Prosentase SPM Pendidikan Khusus	100	6,03
2022	Prosentase SPM Pendidikan Khusus	100	7,88
2023	Prosentase SPM Pendidikan Khusus	100	29,45
2024	Prosentase SPM Pendidikan Khusus	100	66,12

Sumber data : Dinas Pendidikan

Grafik target dan capaian SPM Pendidikan Khsus
Tahun 2020-2024



Sumber data : Dinas Pendidikan

h) Persentase Akreditasi SLB

Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah proses penilaian dan pengakuan resmi terhadap kualitas SLB dalam menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Akreditasi ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk memastikan bahwa SLB tersebut memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, termasuk sarana prasarana, tenaga pendidik, program pembelajaran, dan layanan pendidikan

lainnya, berikut ini capaian akreditasi SLB tahun 2020-2024

Tabel Target dan Capaian Akreditasi SLB Tahun 2020-2024

Persentase Sekolah SLB terakreditasi	Target Per Tahun (%)					Capaian Per Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	12,9	12,9	12,9	12,9	11	12,12	12,12	12	10,26	11
B	51,61	54,84	58,1	48,39	46	72,73	72,73	50	38,46	46
C	9,68	12,9	16,1	6,45	24	9,09	9,09	24	25,64	24
D	28,81	19,35	12,9	32,26	19	6,06	9,06	15	25,64	19

Sumber data : Neraca Pendidikan Daerah dan Dapodik

i) Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1

LSP P1 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama, yaitu lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh dan berada di bawah naungan institusi pendidikan atau pelatihan. LSP P1 biasanya didirikan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), berikut ini target dan capaian jumlah SMK yang memiliki LSP-P1 tahun 2020-2024

Tabel target dan capaian Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1 Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	Target (sekolah)	Realisasi (sekolah)
2021	Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	36	36
2022	Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	41	36
2023	Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	50	50
2024	Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	51	75

Sumber data : Dinas Pendidikan

Grafik target dan capaian Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1



Sumber data : Dinas Pendidikan

j) Rapor pendidikan

Rapor Pendidikan dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pendidikan di suatu satuan pendidikan atau daerah, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan menyajikan data dan informasi mengenai berbagai aspek pendidikan, termasuk capaian pembelajaran siswa, kondisi lingkungan belajar, dan kinerja guru, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, berikut ini target dan capaian rapor Pendidikan tahun 2023-2024

Tabel target dan capaian Rapor Pendidikan SMA, SMK dan SLB
Tahun 2023-2024

No	Rapor pendidikan	Satuan	Target (Tahun)	Capaian (Tahun)	Target (Tahun)	Capaian (Tahun)
			2023	2023	2024	2024
1	Nilai kompetensi Literasi SMA	Nilai	N/a	60,17	64,52	66,93
2	Nilai kompetensi Numerasi SMA	Nilai	N/a	58,78	54,28	58,24
3	Nilai Kompetensi Literasi SMK	Nilai	N/a	56,72	62,36	65,09
4	Nilai Kompetensi Numerasi SMK	Nilai	N/a	54,39	52,90	56,82
5	Nilai kompetensi Literasi SDLB	Nilai	N/a	64,09	62,79	58,06
6	Nilai kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	N/a	64,09	48,51	56,65
7	Nilai kompetensi Literasi SMPLB	Nilai	N/a	40,53	62,46	64,80
8	Nilai kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	N/a	54,04	56,43	57,73
9	Nilai kompetensi Literasi SMALB	Nilai	N/a	33,32	57,46	60,41
10	Nilai kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	N/a	53,85	52,37	57,18
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	N/a	77,64	82,49	80,89
12	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	N/a	83,83	79,00	85,06
13	Nilai Iklim Keamanan SMA	Nilai	N/a	70,98	87,59	70,45
14	Nilai Iklim Kebinekaan SMA	Nilai	N/a	72,48	86,91	71,01
15	Nilai Inklusivitas SMA	Nilai	N/a	58,07	84,77	58,76
16	Nilai Iklim Keamanan SMK	Nilai	N/a	68,84	85,99	69,07
17	Nilai Iklim Kebinekaan SMK	Nilai	N/a	70,28	85,28	69,25
18	Nilai Inklusivitas SMK	Nilai	N/a	56,35	82,21	57,03
19	Nilai Iklim Keamanan SDLB	Nilai	N/a	73,84	86,53	76,20
20	Nilai Iklim Kebinekaan SDLB	Nilai	N/a	63,77	92,97	70,67
21	Nilai Inklusivitas SDLB	Nilai	N/a	61,14	81,35	67,00
22	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Nilai	N/a	73,26	77,41	69,00
23	Nilai Iklim Kebinekaan SMPLB	Nilai	N/a	66,65	72,81	72,41
24	Nilai Inklusivitas SMPLB	Nilai	N/a	61,96	82,21	68,12
25	Nilai Iklim Keamanan SMALB	Nilai	N/a	70,96	78,22	74,00
26	Nilai Iklim Kebinekaan SMALB	Nilai	N/a	64,90	67,64	70,80
27	Nilai Inklusivitas SMALB	Nilai	N/a	63,89	79,88	65,20

Sumber data: Rapor Penddikan

k) Persentase Akreditasi Sekolah Menengah

Akreditasi sekolah menengah adalah proses penilaian mutu dan kelayakan suatu sekolah menengah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Hasil akreditasi ini dinyatakan dalam bentuk peringkat dan nilai, yang mencerminkan kualitas sekolah tersebut, berikut ini target dan capaian akreditasi sekolah menengah tahun 2020-2025 di Sumatera Selatan.

Tabel target dan capaian Persentase Sekolah Menengah yang terakreditasi Tahun 2021-2024

Persentase Sekolah Menengah terakreditasi	Target Per Tahun (%)					Capaian Per Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	23,76	23,76	23,76	23,76	41	37	34,77	39	31,24	30,77
B	30,54	33,01	35,48	28,82	36	42,65	41,88	34	37,84	39,86
C	13,23	14,19	15,27	12,26	17	17,85	17,73	19	20,87	22,89
D	32,47	29,03	25,48	35,15	6	2,5	5,62	8	10,05	6,48

Sumber data : Neraca Pendidikan Daerah

l) Jumlah sekolah yang merapkan kurikulum merdeka

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang mendalam, fokus pada penguatan karakter, dan fleksibilitas dalam penerapan, berikut ini target dan capaian

Jumlah sekolah yang merapkan kurikulum merdeka tahun 2023-2024 di Sumatera Selatan

Tabel target dan capaian sekolah yang merapkan kurikulum Merdeka Tahun 2023-2024

Jumlah sekolah yang merapkan kurikulum merdeka	Target Per Tahun (Sekolah)		Capaian Per Tahun (Sekolah)	
	2023	2024	2023	2024
SMA	Na	59	575	575
SMK	Na	106	267	267
SLB	Na	5	38	38

Sumber data : Dapodik

m) Jumlah Sekolah Penyelenggaran Muatan Lokal

Muatan lokal (mulok) adalah mata pelajaran atau kegiatan kurikuler yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi daerah, termasuk keunggulan dan kearifan lokal. Muatan lokal bertujuan untuk melestarikan budaya, meningkatkan pemahaman siswa tentang lingkungan sekitar, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan konteks daerah, berikut ini target dan capaian jumlah sekolah penyelenggara muatan lokal di Sumatera Selatan Tahun 2022-2023

Tabel target dan capaian
Jumlah Sekolah Penyelenggaran Muatan Lokal Tahun 2023-2024

Jumlah Sekolah Penyelenggaran Muatan Lokal	Target Per Tahun (%)		Capaian Per Tahun (%)	
	2022	2023	2022	2023
SMA	Na	Na	88,1	87,1
SMK	Na	Na	75,2	74,2
SLB	Na	Na	34,2	23,1

Sumber Data : Neraca Pendidikan Daerah

3) Sasaran meningkatnya persentase pendidik bersertifikat dengan indikator kinerja daerah yang ingin dicapai adalah

- a) Persentase pendidik berkualifikasi D-IV/S-1,
Pendidik berkualifikasi adalah tenaga pengajar yang memenuhi standar kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang ditetapkan untuk suatu jenjang dan jenis pendidikan. Kualifikasi ini memastikan pendidik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam membantu peserta didik mencapai tujuan Pendidikan, berikut ini target dan capaian Persentase pendidik berkualifikasi D-IV/S-1 di Sumatera Selatan tahun 2020-2024

Tabel target dan capaian
Persentase pendidik berkualifikasi D-IV/S-1
Tahun 2023-2024

Tahun	Persentase Kualifikasi pendidik	Target (%)	Realisasi (%)
2020	Persentase Kualifikasi pendidik	97,37	89,46
2021	Persentase Kualifikasi pendidik	98,24	95,7
2022	Persentase Kualifikasi pendidik	99,11	96,46
2023	Persentase Kualifikasi pendidik	100	96,63
2024	Persentase Kualifikasi pendidik	100	96,96

Sumber data : Neraca Pendidikan Daerah dan Dapodik

Grafik target dan capaian
Persentase Pendidik berkualifikasi D-IV/S-1
Tahun 2020-2024



Sumber data : Neraca Pendidikan Daerah dan Dapodik

b) Persentase Guru Tersertifikasi

Guru bersertifikasi adalah guru yang telah memperoleh pengakuan formal sebagai tenaga profesional melalui proses sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mengajar dengan efektif, berikut ini target dan capaian Persentase guru tersertifikasi di Sumatera Selatan tahun 2020-2023

Tabel target dan capaian Persentase Guru Tersertifikasi
Tahun 2020-2023

Persentase Guru Tersertifikasi	Target Per Tahun (%)				Capaian Per Tahun (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
SMA	Na	Na	Na	Na	40,3	34,8	32,9	32,9
SMK	Na	Na	Na	Na	29,1	24,2	24,2	24,9
SLB	Na	Na	Na	Na	34,5	37,3	23,5	23,4

Sumber data : Neraca Pendidikan Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pendidikan sangat luas dan beragam, mencakup individu dari berbagai usia dan latar belakang. Kelompok ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti: peserta didik (siswa), guru dan tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat umum. Selain itu, layanan pendidikan juga bisa ditujukan untuk kelompok rentan seperti anak usia dini, remaja putus sekolah, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Siswa kelompok sasaran layanan dari penduduk 16-18 tahun dan penduduk 4-18 tahun untuk pendidikan disabilitas
- 2) Semua guru dari berbagai jenis pendidikan untuk seluruh jenis satuan pendidikan termasuk guru pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lainnya
- 3) Semua tenaga kependidikan untuk seluruh jenis satuan pendidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya yang berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan
- 4) Lembaga Pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan NonFormal

Semua jenis dan jenjang sekolah membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Perguruan tinggi membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) begitu juga lembaga kursus, pelatihan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat juga membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas program

- 5) Masyarakat Umum dan Kelompok Khusus dan Vokasi
- Layanan pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk masyarakat adat, kelompok minoritas, dan masyarakat yang tinggal di

daerah tertinggal dan juga layanan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja

6) Orang tua dan keluarga

Mebutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pendidikan anak, pola asuh, serta perkembangan anak, Layanan pendidikan keluarga bertujuan untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak

Penting untuk dicatat bahwa kelompok sasaran layanan pendidikan sangat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, layanan pendidikan harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh kelompok sasaran

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Dinas Pendidikan memiliki crosscutting dengan beberapa perangkat daerah yang memang dibutuhkan untuk menciptakan sinergitas di dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, antara lain :

- 1) Dalam pelayanan data siswa ini sangat terkait dengan data kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil terkait sinkronisasi NIK
- 2) Dalam pelayanan siswa miskin sangat berkaitan dengan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial
- 3) Peningkatan nilai literasi berkaitan dengan Dinas Perpustakaan Daerah
- 4) Penanggulangan kekerasan pada satuan pendidikan ini berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5) Pengelolaan bangunan pada satuan pendidikan ini berkaitan dengan Dinas PU Perkim dalam pengelolaan analisis tingkat kerusakan bangunan sekolah

6) Terkait pengelolaan data ini bersinkronisasi dengan BPS

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan dasar, Dinas Pendidikan sudah memetakan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi ataupun yang akan datang agar dapat segera mengintervensi permasalahan tersebut, sehingga tidak mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Masih belum maksimalnya akses dan layanan akan pendidikan hal ini bisa dilihat dengan target dan pencapaian terhadap indikator utama pada Dinas Pendidikan, seperti :

- 1) Belum maksimalnya capaian angka partisipasi sekolah dimana untuk tahun 2024 angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun 70,8 % artinya belum mampu untuk memberikan pelayanan maksimal bagi anak 16-18 tahun untuk memperoleh pendidikan yang layak dan masih terdapat indikasi Anak Tidak Sekolah dalam kategori anak putus sekolah, anak lulus tidak melanjutkan dan anak tidak pernah sekolah

- 2) Belum maksimalnya capaian angka partisipasi murni

Angka partisipasi murni angka yang menunjukkan ukuran proporsi penduduk usia sekolah yang sebenarnya bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, dibandingkan dengan total penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. APM dinyatakan

dalam persentase dan membantu mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang sesuai, kondisi saat ini di Provinsi Sumatera Selatan APM baru mencapai angka 62,70 persen dan masih jauh dari target yang harus dicapai.

3) Belum maksimalnya capaian angka harapan lama sekolah

Belum maksimalnya capaian angka harapan lama sekolah mengindikasikan bahwa rata-rata lama waktu yang diharapkan penduduk untuk mengenyam pendidikan formal masih belum mencapai target yang optimal. Faktor yang mempengaruhi HLS yang belum maksimal antara lain : Keterbatasan akses ke sekolah, terutama di daerah terpencil atau tertinggal, dapat menghambat capaian HLS, Kemiskinan dan masalah ekonomi keluarga dapat memaksa anak-anak untuk putus sekolah dan bekerja untuk membantu keluarga, Kualitas pendidikan yang rendah, termasuk kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas, juga dapat mempengaruhi motivasi siswa untuk melanjutkan Pendidikan, Beberapa budaya atau norma masyarakat mungkin kurang mendukung pendidikan, terutama pendidikan tinggi bagi Perempuan. Dimana saat ini HLS di Sumsel baru mencapai 12,64 tahun artinya anak-anak di Sumsel baru menamatkan Pendidikan jenjang D-1, dimana harapan yang dicapai adalah minimal S-1

4) Belum maksimalnya capaian angka rata-rata lama sekolah

Pencapaian angka rata-rata lama sekolah yang belum maksimal menunjukkan bahwa masih

banyak penduduk usia sekolah yang belum menempuh pendidikan hingga jenjang yang diharapkan, atau belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih berada di tingkat SMP. Faktor penyebabnya antara lain: Keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, Kemiskinan dan masalah ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak untuk bekerja, Kurangnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan, Kualitas pendidikan yang belum merata di berbagai daerah. Kondisi saat ini di Sumsel rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,85 tahun artinya anak di Sumsel belum menamatkan jenjang Pendidikan SMP

5) Belum maksimalnya capaian SPM Pendidikan Menengah

Belum maksimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah mengindikasikan bahwa target-target yang ditetapkan dalam SPM, yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dasar dan menengah, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala dalam pemenuhan indikator-indikator SPM, keterbatasan sumber daya, atau masalah dalam implementasi kebijakan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan belum maksimalnya capaian SPM Pendidikan Menengah keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, atau infrastruktur yang tidak memadai, Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial,

dapat menjadi penghalang dalam upaya pemenuhan SPM, Meskipun kebijakan SPM sudah ditetapkan, implementasinya di lapangan mungkin menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pemahaman tentang SPM, atau kurangnya pengawasan dan evaluasi. Kondisi saat ini di Sumsel SPM Pendidikan Menengah baru mencapai 98,76 % dari target 100 % artinya masih ada anak di usia 16-18 tahun yang belum terlayani

6) Belum maksimalnya capaian SPM Pendidikan Khusus

Belum maksimalnya capaian SPM Pendidikan Khusus mengindikasikan bahwa target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pendidikan khusus belum sepenuhnya tercapai. Hal ini berarti pelayanan dasar pendidikan khusus yang seharusnya diterima oleh setiap peserta didik secara minimal, belum terpenuhi secara optimal. Ketidakmaksimalan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendidik terlatih, terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan khusus. Kondisi saat ini di Sumsel untuk SPM Pendidikan Khusus baru mencapai 66,12 % dari target 100 %, artinya anak disabilitas/berkebutuhan khusus usia 4-18 tahun masih ada yang belum terlayani

7) Belum maksimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusi

Penyelenggaraan pendidikan seperti halnya di banyak daerah lain, belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk

kurangnya kesiapan guru, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak, kurikulum yang ada mungkin belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan ABK, sehingga menyulitkan mereka untuk mengikuti pembelajaran, Ketersediaan GPK di setiap sekolah inklusi masih terbatas, padahal peran mereka sangat penting dalam membantu ABK. Kondisi saat ini di Sumsel masih belum banyak sekolah umum yang menjalankan Pendidikan inklusi, dimana baru ada 116 sekolah yang menjalankan Pendidikan inklusi itupun hanya dengan anak berkebutuhan khusus dengan ABK tertentu saja

- 8) Belum maksimalnya Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK

Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK belum maksimal karena adanya ketidaksesuaian antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia industri, serta kurangnya penekanan pada pengembangan soft skills. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK: Kurikulum SMK seringkali belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri terkini, Lulusan SMK mungkin memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi seringkali kurang memiliki soft skills seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi yang dibutuhkan di dunia kerja, Beberapa sekolah kejuruan mungkin kekurangan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan standar industri,

Kerjasama antara sekolah dengan dunia industri masih perlu ditingkatkan untuk memastikan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi saat ini di Sumsel Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK baru mencapai 85,06 %

9) Belum maksimalnya Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

Tingkat penyerapan lulusan SMK yang belum maksimal mengindikasikan adanya kesenjangan antara kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK, penyebab hal tersebut antara lain: Lulusan SMK seringkali belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, atau "link and match" yang kurang baik antara kurikulum SMK dengan tuntutan dunia kerja, Lulusan SMK mungkin kesulitan mengakses informasi tentang peluang kerja yang tersedia, terutama di daerah-daerah tertentu, Ada beberapa kasus di mana kualitas lulusan SMK belum memenuhi standar yang diharapkan oleh Perusahaan, Beberapa lulusan SMK kurang memiliki jiwa wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Kondisi saat ini Tingkat Penyerapan Lulusan SMK baru mencapai 80,89%

b) Belum meratanya mutu pendidikan

Belum meratanya mutu pendidikan mengacu pada disparitas kualitas pendidikan yang ada di berbagai daerah atau kelompok sosial dalam suatu negara. Di Indonesia, hal ini menjadi isu yang cukup signifikan, di mana mutu pendidikan di wilayah perkotaan cenderung

lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil. Penyebab ketidakmerataan mutu pendidikan:

1. Infrastruktur yang tidak memadai

Daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang layak, seperti gedung sekolah, ruang kelas, RPS, perpustakaan, dan laboratorium serta prasarana penunjang Pendidikan lainnya

2. Kualitas guru yang bervariasi

Kualitas dan kompetensi guru juga bisa berbeda-beda, dengan daerah terpencil yang mungkin kekurangan tenaga pengajar berkualitas

3. Keterbatasan akses

Akses terhadap pendidikan berkualitas, termasuk transportasi dan internet, bisa menjadi tantangan di daerah terpencil

4. Faktor ekonomi dan sosial

Kemiskinan dan masalah sosial lainnya juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan anak-anak di daerah tertentu.

Dampak ketidakmerataan mutu pendidikan:

1. Kesenjangan kualitas SDM

Ketidakmerataan ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing bangsa

2. Keterbatasan kesempatan

Anak-anak di daerah dengan mutu pendidikan rendah mungkin memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang layak

3. Persebaran pembangunan yang tidak merata

Ketidakmerataan pendidikan juga dapat berkontribusi pada ketidakseimbangan pembangunan di berbagai daerah

Pemerataan mutu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Dengan upaya bersama, diharapkan kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia dapat diatasi, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas.

c) Belum maksimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia

Belum maksimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses pendidikan yang tidak merata, kualitas guru dan kurikulum yang belum optimal, serta minimnya pelatihan kerja dan pembelajaran seumur hidup. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah ini:

1. Akses Pendidikan yang Tidak Merata

Beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga menghambat akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut

2. Kualitas Guru dan Kurikulum

Kualitas guru dan kurikulum yang belum optimal juga menjadi masalah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, serta merevisi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja

3. Minimnya Pelatihan Kerja dan Pembelajaran Seumur Hidup

Pelatihan kerja dan pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Minimnya akses dan ketersediaan program pelatihan yang berkualitas menjadi kendala dalam peningkatan kualitas SDM

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Selain faktor eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pelatihan juga menjadi penghambat. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan, sehingga kurang termotivasi untuk menuntut ilmu

Dampak dari belum maksimalnya peningkatan kualitas SDM:

1. Rendahnya Produktivitas

SDM yang kurang berkualitas cenderung memiliki produktivitas yang rendah, yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan

2. Rendahnya Daya Saing

Kualitas SDM yang rendah membuat Indonesia kurang kompetitif di pasar global

3. Pengangguran dan Ketidakstabilan Sosial Ekonomi

Minimnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan yang layak, sehingga memicu pengangguran dan masalah sosial ekonomi

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis pendidikan adalah masalah-masalah krusial yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan. Isu-isu ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan efektivitas pendidikan secara keseluruhan. Beberapa isu strategis yang sering dibahas dalam konteks pendidikan di Indonesia meliputi pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, relevansi kurikulum, dan kesenjangan digital. Berikut adalah beberapa isu strategis Pendidikan yang sangat relevan untuk saat ini, antara lain:

1. Akses Terhadap Pendidikan

❖ Pemerataan akses

Isu ini berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan tertinggal

❖ Keterjangkauan

Biaya pendidikan yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk mengakses Pendidikan

2. Kualitas Pendidikan

❖ Kualitas Guru

Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan kesejahteraan yang memadai merupakan isu penting

❖ Kurikulum

Relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia kerja menjadi tantangan tersendiri

- ❖ Fasilitas dan Infrastruktur
Kondisi fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai di beberapa daerah menghambat proses pembelajaran
 - ❖ Kualitas Pembelajaran
Isu ini mencakup kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penggunaan teknologi, dan pengembangan keterampilan abad 21
 - ❖ Penilaian dan evaluasi
Sistem penilaian dan evaluasi yang efektif dan adil perlu terus dikembangkan untuk mengukur capaian belajar peserta didik
3. Tata Kelola Pendidikan
- ❖ Efektivitas Kebijakan
Perlunya kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan implementasinya yang efektif di lapangan
 - ❖ Pengelolaan Anggaran
Pengalokasian dan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel juga menjadi isu penting
 - ❖ Partisipasi Masyarakat
Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun non-finansial
4. Isu-isu Khusus
- ❖ Pendidikan Inklusi
Penyediaan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya
 - ❖ Pendidikan Vokasi
Peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar lulusannya siap bersaing di dunia kerja
 - ❖ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan

Memastikan PAUD berkualitas dan setara dengan jenjang pendidikan lainnya

❖ Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

5. Isu Global

❖ Literasi Digital

Kemampuan peserta didik untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak

❖ Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan menafsirkan informasi kuantitatif untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks, Literasi numerasi meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi, menerapkan, dan menafsirkan konsep matematika dalam berbagai situasi. Literasi numerasi yang baik membantu individu untuk menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas matematika, mengasah keterampilan logika dan analisis, serta mengambil keputusan yang tepat

❖ Pendidikan Karakter

Penanaman nilai-nilai karakter yang kuat pada peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab

❖ Kesiapan Menghadapi Perubahan

Pendidikan perlu membekali peserta didik dengan keterampilan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan dunia kerja

Tabel 2.1 TC 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	APK Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 13		87,36	89,12	90	90,88	90,42	93,24	94,26	93,45	94,66	97,86	106,73%	105,77%	104%	104,16%	108,23%
2	APM Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 13		61,04	62,02	63	63,98	61,2	60,45	60,53	59,83	61,91	65,06	99,03%	97,60%	95%	96,76%	106,31%
3	APS Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 13		75,11	77,13	79,15	81,17	74,39	70,91	71,53	70,93	71,71	70,8	94,41%	92,74%	90%	88,35%	95,17%
4	APTS Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 13		1,81	1,31	0,81	0,31	0,38	0,35	0,32	0,29	0,24	0,19	19,34%	24,43%	36%	77,42%	50,00%
5	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 13		94	95	96	97	93	94	94	94	116	116	100,00%	98,95%	97,9%	119,59%	124,73%
6	Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi:	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																
A					12,9	12,9	12,9	12,9	12,12	12,12	12	10,53	10,26		93,95%	93,02%	81,6%	79,53%	0,00%
B					51,61	54,84	58,1	61,29	72,73	72,73	50	39,47	38,46		140,92%	91,17%	67,9%	62,75%	0,00%
C					9,68	12,9	16,1	15,81	9,09	9,09	24	23,68	25,64		93,90%	186,05%	147,1%	162,18%	0,00%
D					28,81	19,35	12,9	10	6,06	9,06	15	26,32	25,64		31,45%	77,52%	204,0%	256,40%	0,00%
7	Persentase Pendidik Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S-1	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		97,37	98,24	99,11	100	95,99	89,47	95,70	96,47	96,63		91,89%	97,41%	97,3%	96,63%	0,00%
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																
SMA					01:33	01:30	01:28	01:26	01:35	01:15	01:15	01:14	01:15	01:15	80,65%	83,33%	84,1%	87,21%	78,95%
SMK					01:53	01:54	01:52	01:50	01:06	01:19	01:16	01:15	01:15	01:15	69,91%	66,67%	67,0%	68,18%	113,64%
9	Persentase sekolah menengah terakreditasi:	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																
A					23,76%	23,76%	23,76%	23,76%	30,32%	32,70%	26,56%	31,78%	31,26%		137,63%	111,78%	133,7%	131,54%	0,00%
B					30,54%	33,01%	35,48%	37,42%	33,95%	40,50%	43,61%	39,51%	39,07%		132,61%	132,11%	111,3%	104,41%	0,00%
C					13,23%	14,19%	15,27%	16,13%	8,95%	22,20%	22,74%	22,40%	21,98%		167,80%	160,25%	146,7%	136,24%	0,00%
D					32,47%	29,03%	25,48%	22,69%	26,85%	4,55%	5,48%	6,32%	10,05%		14,01%	18,86%	24,8%	44,29%	0,00%
10	Lulusan SMK yang terserap kerja	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		57,96	60,14	62,32	64,5	65,5	na	70	75	80,89	85,06	0,00%	116,40%	120,3%	125,41%	129,86%
11	Persentase Kelulusan Sekolah Menengah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		100	100	100	100	96,46	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	103,67%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		100	100	100	100	100	51,41	58,14	94,39	94,75	98,78	0,00%	0,00%	94,4%	94,75%	98,78%
13	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		100	100	100	100	100	6,03	7,88	8,37	29,49	66,12	0,00%	0,00%	8,4%	29,49%	66,12%
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		100	100	100	100	100	51,41	58,14	94,39	94,75	98,78	0,00%	58,14%	94,4%	94,75%	98,78%
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Peningkatan Akses Pendidikan	Memantapkan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		100	100	100	100	100	6,03	7,88	8,37	29,49	66,12	6,03%	7,88%	8,4%	29,49%	66,12%
16	Jumlah LSP yang terbentuk	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		n/a	36	41	47	52	36	36	47	184	184	0,00%	100%	114,6%	391,49%	353,85%
17	Jumlah SMK yang memiliki kurikulum link and match dengan IDUKA	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		n/a	n/a	50	70	90	50	50	50	105	105,00%	0,00%	100%	100,0%	150,00%	1,17%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Menengah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Luar Biasa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pendidikan Menengah Khusus Siswa miskin	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	2.576.225.414.300	1.431.094.907.948	1.433.694.156.233	1.575.662.368.984	-	2.463.052.502.834	1.295.226.016.799	1.298.399.761.833	1.523.205.933.249	-	0,96	0,91	0,91	0,97	7.016.676.847.465	6.579.884.214.715
Program Pengelolaan Pendidikan	-	786.202.188.150	820.283.430.432	1.088.956.192.367	1.147.335.842.599	-	739.973.447.129	804.151.328.244	1.054.322.415.427	1.064.570.867.593	-	0,94	0,98	0,97	0,93	3.842.777.653.548	3.663.018.058.393
Program Pengembangan kurikulum	-	376.500.000	600.000.000	600.000.000	550.000.000	-	215.795.000	457.089.300	549.947.264	437.823.756	-	0,57	0,76	0,92	0,80	2.126.500.000	1.660.655.320
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		-	530.000.000	420.000.000	2.159.000.000		-	312.777.037	276.733.852	1.831.699.855	-	-	0,59	0,66	0,85	3.109.000.000	2.421.210.744
Total	-	3.362.804.102.450	2.252.508.338.380	2.523.670.348.600	2.725.707.211.583	-	3.203.241.744.963	2.100.147.211.380	2.353.548.858.376	2.590.046.324.453						10.864.690.001.013	10.246.984.139.172

Tabel 2.3 (Inmen 2/2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu SMA, SMK dan SLB	a) Masih belum maksimalnya akses dan layanan akan pendidikan	Kesejahteraan sosial dan ekonomi, tata kelola	Belum meratanya Akses dan layanan pendidikan	Wajib belajar 13 tahun	Belum meratanya Akses dan layanan pendidikan	1. Kurangnya Pemerataan Akses 2. Keterjangkauan biaya pendidikan
	b) Belum maksimalnya pengelolaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	Kesejahteraan sosial dan ekonomi, tata kelola	Belum meratanya Akses dan layanan pendidikan	Wajib belajar 13 tahun	Pendidikan Inklusi	Kepedulian akan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
	c) Belum meratanya mutu pendidikan	Tata Kelola	Ketimpangan kualitas Pendidikan (Literasi Digital, literasi dan numerasi dalam hal ini capaian nilai PISA), penggunaan dan memanfaatkan teknologi	Ketimpangan kualitas Pendidikan (Literasi Digital, literasi dan numerasi dalam hal ini capaian nilai PISA), penggunaan dan memanfaatkan teknologi	Ketimpangan kualitas Pendidikan (Literasi Digital, literasi dan numerasi dalam hal ini capaian nilai PISA), penggunaan dan memanfaatkan teknologi	1. Masih rendahnya nilai Pisa dan nilai rapor pendidikan 2 Masih belum meratanya kualitas Mutu Pendidikan 3. Masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran
	d) Belum maksimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia	Tata Kelola	1. Pendidikan Karakter 2. Kesiapan Menghadapi Perubahan	Rendahnya daya saing dan rendahnya produktivitas SDM	Pendidikan Vokasi	1. Belum maksimalnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan 2. Masih rendahnya kualitas pembelajaran 3. Belum maksimalnya pendidikan vokasi dalam membuka lapangan pekerjaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam rencana aksi yang lebih operasional pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2025-2029, dengan visi yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah **“SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA”**. Untuk mencapai Visi tersebut maka disusunlah kedalam beberapa tujuan sesuai dengan arah dan kebijakan yang akan dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan masuk pada Misi ke I yaitu : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah target-target spesifik yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran ini dirumuskan untuk mengarahkan upaya pembangunan dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja. Pembangunan bidang pendidikan tertuang pada Misi I dengan tujuan meningkatnya

kualitas sumber daya manusia dengan 3 (tiga) indikator dan 9 (sembilan) sasaran utama yang harus dicapai selama periode tahun 2025-2029, dengan penjabaran sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pemeratan pelayanan Pendidikan di Sumsel
 - b) Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Sumsel
 - c) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
 - d) Meningkatnya budaya literasi di Sumsel
 - e) Meningkatnya derajat Kesehatan
 - f) Meningkatnya Pembangunan sektor kepemudaan
 - g) Meningkatnya Kesetaraan Gender
 - h) Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak
 - i) Meningkatnya Fasilitas bagi penyandang disabilitas
3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) melibatkan serangkaian langkah terencana untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tertentu (biasanya 5 tahun). Dari 9 (Sembilan) sasaran utama yang memang menjadi tugas nya Dinas Pendidikan ada 5 (lima) sasaran dan selebihnya adalah sasaran yang merupakab cross cutting dengan organisasi perangkat lainnya. Adapun strategi pencapaian sasaran tersebut, antara lain:

- a) Meningkatnya pemeratan pelayanan Pendidikan di Sumsel
Strategi meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini melibatkan upaya untuk mengatasi kesenjangan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan di berbagai daerah dan kelompok sosial. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pemerataan layanan pendidikan meliputi:

- ❖ **Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendidikan**
Memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal, serta melakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada
- ❖ **Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik**
Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru, serta memastikan adanya distribusi guru yang merata di semua wilayah
- ❖ **Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Keuangan**
Memberikan bantuan keuangan dan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya.
- ❖ **Pengembangan Kurikulum yang Relevan**
Merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dari berbagai latar belakang, serta memasukkan materi yang relevan dengan konteks lokal
- ❖ **Pemanfaatan Teknologi**
Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah terpencil, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
- ❖ **Program Afirmasi**
Melaksanakan program-program khusus yang ditujukan untuk kelompok siswa yang kurang beruntung, seperti siswa dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau siswa di daerah terpencil
- ❖ **Penguatan Kemitraan**
Melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam upaya pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan tidak hanya penting untuk memastikan hak setiap individu mendapatkan pendidikan, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan

b) Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sumsel

Strategi peningkatan kualitas pendidikan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Beberapa strategi kunci meliputi peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta peningkatan partisipasi aktif siswa dan orang tua, dengan penjelasan sebagai berikut:

❖ Peningkatan Kompetensi Guru

- Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengajar guru
- Pemberian insentif dan motivasi bagi guru untuk meningkatkan kinerja
- Supervisi dan evaluasi kinerja guru secara berkala untuk memastikan kualitas pengajaran

❖ Pengembangan Kurikulum yang Relevan

- Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman
- Kurikulum yang fokus pada pengembangan keterampilan abad 21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi
- Penyediaan bahan ajar yang berkualitas dan aksesibel

❖ Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

- Penggunaan perangkat teknologi, seperti komputer, internet, dan perangkat lunak pembelajaran.
- Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa

- Pelatihan guru dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran
- ❖ Partisipasi Aktif Siswa dan Orang Tua
 - Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan partisipatif
 - Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, seperti diskusi, proyek, dan presentasi
 - Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua
- ❖ Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Penyediaan fasilitas belajar yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium dan sarana prasarana lainnya
 - Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus
- ❖ Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
 - Evaluasi berkala terhadap program pendidikan dan hasil belajar siswa
 - Identifikasi kelemahan dan perbaikan yang perlu dilakukan
 - Penyesuaian strategi dan metode pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi
- ❖ Pengelolaan Sekolah yang Efektif
 - Kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan memotivasi staf
 - Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - Penciptaan budaya sekolah yang positif dan mendukung pembelajaran

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing

c) Meningkatkan Keterampilan Sumber Daya Manusia

Strategi meningkatnya keterampilan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individu dalam suatu organisasi. Ini melibatkan berbagai pendekatan seperti pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan karir, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan mencapai tujuan organisasi.

❖ Pendidikan dan Pelatihan

➤ Pelatihan Berkelanjutan

Memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan individu dan organisasi, baik secara tradisional maupun digital (misalnya, webinar, simulasi, video pelatihan)

➤ Pendidikan Formal

Mendorong karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti kursus-kursus yang relevan dengan pekerjaan mereka

➤ Pembinaan (Mentoring)

Memberikan bimbingan dari senior atau ahli untuk membantu ekosistem pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan

❖ Pengembangan Sistem

➤ Sistem Penilaian Kinerja

Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu dibenahi serta ditingkatkan

➤ Sistem Komunikasi yang Efektif

Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan untuk memastikan semua mendapatkan informasi yang dibutuhkan

➤ Manajemen Kinerja

Menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk memantau dan meningkatkan produktivitas organisasi

- Sistem Penghargaan dan Pengakuan
Memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja yang baik untuk meningkatkan motivasi

d) Meningkatkan budaya literasi di Sumsel

Untuk meningkatkan literasi, baik itu literasi membaca, numerasi, atau digital, kuncinya adalah membiasakan diri dan membangun lingkungan yang mendukung. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti membaca secara rutin, berdiskusi tentang teks, memanfaatkan teknologi untuk belajar, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, dengan strategi sebagai berikut:

- ❖ Membangun Kebiasaan Membaca

Mulailah dengan membaca buku yang disukai, Bergabung dengan kelompok membaca, sediakan berbagai jenis bahan bacaan

- ❖ Mengembangkan Literasi Numerasi

- Belajar matematika dasar: Kuasai konsep dasar matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari
- Gunakan angka dalam kehidupan sehari-hari: Hitung biaya belanja, ukur bahan makanan, atau gunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah
- Mainkan permainan matematika: Permainan matematika interaktif dapat meningkatkan keterampilan numerasi

- ❖ Meningkatkan Literasi Digital

- Berpikir kritis: Evaluasi informasi yang ditemukan di internet dengan kritis, tidak semua informasi itu benar.
- Kuasai teknik mencari informasi: Pelajari cara mencari, memilah, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber online
- Gunakan media sosial untuk belajar: Manfaatkan media sosial untuk belajar dan berkolaborasi dengan orang lain
- Pahami budaya digital: Pelajari bagaimana berinteraksi dengan baik di dunia digital.

- Prioritaskan keamanan online: Jaga keamanan diri saat berinteraksi di internet
- Terus belajar dan beradaptasi: Dunia digital terus berubah, jadi penting untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan
- ❖ Menciptakan Lingkungan yang Mendukung
 - Sekolah
Ciptakan lingkungan sekolah yang mendukung literasi dengan menyediakan perpustakaan yang nyaman, program literasi yang menarik, dan kegiatan membaca bersama
 - Rumah
Libatkan orang tua dalam kegiatan literasi anak, ciptakan suasana membaca yang menyenangkan di rumah, dan berikan contoh membaca yang baik
 - Tempat kerja
Ciptakan budaya literasi di tempat kerja dengan menyediakan akses ke bahan bacaan, mengadakan diskusi buku, dan mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan
- ❖ Membangun Budaya Literasi:
 - Berikan umpan balik yang konstruktif:
Berikan umpan balik yang spesifik dan bermanfaat kepada siswa atau rekan kerja tentang keterampilan literasi mereka
 - Libatkan siswa dalam kegiatan literasi
Ajak siswa untuk membuat majalah dinding, koran sekolah, atau blog untuk meningkatkan minat baca dan menulis
 - Lakukan diskusi dan refleksi
Ajak siswa untuk berdiskusi tentang apa yang mereka baca, ini akan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik

- Berikan penghargaan
 - Berikan penghargaan kepada siswa yang telah menunjukkan prestasi dalam kegiatan literasi
- e) Meningkatnya Fasilitas bagi penyandang disabilitas

Strategi untuk meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas meliputi pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Penting juga untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas

 - ❖ Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas

Membangun fasilitas publik yang mudah diakses, seperti jalur khusus untuk tunanetra, ramp, dan toilet yang disesuaikan, Memastikan ketersediaan parkir khusus disabilitas dan aksesibilitas ke semua area fasilitas
 - ❖ Penyediaan Sarana dan Prasarana

Menyediakan alat bantu jalan seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar, Memastikan ketersediaan kursi prioritas dan informasi dalam bentuk yang mudah diakses (misalnya, braille, audio)
 - ❖ Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman

Mengadakan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas, Mendorong komunikasi yang ramah dan inklusif, serta menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan
 - ❖ Perencanaan dan Kebijakan

Mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan, Melakukan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan penyandang disabilitas

❖ **Pemberdayaan Ekonomi**

Memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi bagi penyandang disabilitas, Menciptakan peluang usaha dan pekerjaan yang inklusif, Melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan, serta membangun kerjasama yang erat untuk mendukung perkembangan siswa

❖ **Pendidikan Inklusi**

Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan individu dan memberikan pengajaran yang sesuai, Memberikan dukungan tambahan, seperti guru pendamping (shadow teacher), waktu tambahan, atau alat bantu belajar khusus, sesuai kebutuhan siswa

❖ **Pembentukan dan Penguatan unit layanan disabilitas**

Strategi penguatan unit layanan disabilitas (ULD) mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengembangan kebijakan yang inklusif, peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang ramah disabilitas, penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai, serta penguatan kesadaran dan pemahaman tentang disabilitas di seluruh lapisan masyarakat

4. **Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) adalah serangkaian prioritas dan pedoman yang ditetapkan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Arah kebijakan ini memastikan keselarasan antara berbagai kegiatan pembangunan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, serta mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan Visi dan Misi di bidang

Pendidikan dengan arah kebijakan yaitu Pendidikan yang berkualitas, dengan program strategis yang akan dicapai periode 2025-2029, antara lain :

a) Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas
Arah kebijakan yang diambil antara lain :

❖ Akses yang Berkeadilan

Memastikan semua anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil, memiliki akses ke sekolah yang berkualitas, dilakukan dengan cara :

- Penyediaan Pendanaan Pendidikan untuk biaya operasional satuan pendidikan
- Sekolah Khusus anak yang memiliki prestasi akademik dari kalangan orang tua yang tidak mampu gratis tanpa biaya apapun

❖ Peningkatan Infrastruktur Pendidikan baik Pembangunan, maupun revitaliasi Gedung Pendidikan serta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya serta pemerataan fasilitas pendidikan

❖ Pendidikan Vokasi:

Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) juga menjadi fokus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, menciptakan kewirausahaan dan meningkatkan kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK

❖ Pendidikan Inklusi

- Memastikan semua anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa
- Memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru untuk dapat mengajar dengan efektif dalam konteks pendidikan inklusif

- Meningkatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif
 - Menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung semua peserta didik, baik di kelas reguler maupun melalui model pembelajaran yang disesuaikan
 - ❖ Pengembangan talenta dan prestasi
 - Pendidikan karakter
 - Meningkatnya prestasi dan inovasi siswa di level Provinsi dan level Nasional
 - Test kemampuan akademik
 - Coding dan AI
 - SPMB yang berkeadilan
 - b) Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal
- Arah kebijakan untuk meningkatkan sumber daya pendidikan dan mendorong kurikulum muatan lokal adalah dengan memastikan ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah
- ❖ Melakukan penelitian dan analisis mendalam tentang potensi sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi daerah untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan kurikulum muatan lokal.
 - ❖ Memberikan pelatihan kepada guru tentang bagaimana mengajar materi muatan lokal secara efektif dan menarik
 - ❖ Menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan potensi daerah, seperti bahasa dan sastra daerah, kesenian daerah, sejarah lokal, potensi pertanian, kerajinan tangan, dan lainnya

- c) Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru
 - ❖ Pembelajaran Berkualitas
Meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pemanfaatan teknologi Pendidikan
 - ❖ Peningkatan Kualifikasi Pendidik
 - ❖ Penguatan Kelompok belajar
 - ❖ Peningkatan Kesejahteraan Guru
- d) Melanjutkan program literasi dan Numerasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
 - ❖ Penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi pembelajaran
 - ❖ Pengembangan profesional guru
Kebijakan juga berfokus pada peningkatan kompetensi guru dalam mengajarkan literasi dan numerasi, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan
 - ❖ Pemanfaatan teknologi pendidikan juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan literasi dan numerasi, baik dalam pembelajaran maupun dalam asesmen
- e) Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi
 - ❖ Program Kuliah gratis bagi siswa menyesuaikan dengan kebutuhan yang relevan saat ini yang memang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	Target Tahun						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	(2) Meningkatnya Kualitas Pemerataan dan Peningkatan Kewenangan Provinsi	(3) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi	(4)								(12)
			1. Indeks Modal Manusia (IMM)	Na	Na	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	
			2. Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)	70,8	100	100	100	100	100	100	
			3. Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas (APS)	48,95	100	100	100	100	100	100	
			4. Angka Partisipasi Kasar	97,86	98,36	98,86	99,36	99,86	100	100	
			5. Angka Partisipasi Murni	65,06	75,72	80,72	85,72	90,72	95,72	96,02	
			6. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	94	95	96	101	106	111	116	
			7. Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	98,78	100	100	100	100	100	100	
			8. Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	66,12	100	100	100	100	100	100	
			9. Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan	300	300	324	324	324	324	324	
			10. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,57	8,65	8,73	8,81	8,89	8,97	9,05	
Meningkatnya Mutu Pendidikan			11. Harapan Lama Sekolah	12,64	12,67	12,71	12,74	12,77	12,81	12,84	
			1. Persentase Akreditasi SLB								
			Akreditasi A	10,26	11	13	16	18	20	22	
			Akreditasi B	38,46	44	47	49	52	55	58	
			Akreditasi C	25,64	25	23	21	19	17	15	
			Akreditasi D	25,64	20	17	14	11	8	5	
			2. Persentase Akreditasi Sekolah Menengah								
			Akreditasi A	31,25	43	45	47	49	51	53	
			Akreditasi B	37,07	38	40	41	42	43	44	
			Akreditasi C	21,63	15	13	11	8	6	2	
			Akreditasi D	10,05	4	2	1	1	1	1	
			3. Nilai Raport Pendidikan								
			SMA								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	Target Tahun						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)							(12)	
			Kemampuan literasi	66,93	67,53	68,13	68,73	69,33	69,93	70,53	
			Kemampuan numerasi	58,24	59,84	61,44	63,14	64,54	66,24	67,84	
			Indeks iklim keamanan	70,45	79,16	80,36	81,86	82,76	83,96	85,16	
			Indeks iklim kebencanaan	71,01	72,01	73,01	74,01	75,01	76,01	77,01	
			Indeks iklim inklusivitas	58,76	60,26	61,75	63,26	64,75	66,25	67,76	
			SMK								
			Kemampuan literasi	65,09	66,39	67,69	68,99	70,29	71,59	72,89	
			Kemampuan numerasi	56,82	59,02	61,22	63,42	65,62	67,82	70,02	
			Tingkat penyerapan lulusan SMK	80,89	81,46	82,03	82,6	83,18	83,75	84,32	
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	85,06	85,6	86,14	86,58	87,22	87,76	88,3	
			Indeks iklim keamanan	69,07	70,27	71,47	72,57	73,87	75,07	76,27	
			Indeks iklim kebencanaan	69,25	70,95	71,85	73,15	74,45	75,75	77,05	
			Indeks iklim inklusivitas	57,03	59,33	61,63	63,93	66,23	68,53	70,83	
			SDLE								
			Indeks iklim keamanan	76,2	76,7	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2	
			Indeks iklim kebencanaan	70,06	71,67	72,57	73,67	74,67	75,67	76,67	
			Indeks iklim inklusivitas	67	68,3	69,6	70,9	72,2	73,5	84,8	
			Kemampuan literasi	58,06	59,66	61,26	62,86	64,46	66,06	67,66	
			Kemampuan numerasi	56,65	57,25	57,85	58,45	59,05	59,65	60,25	
			SMPLB								
			Indeks iklim keamanan	69	70,2	71,4	72,6	73,8	75	76,2	
			Indeks iklim kebencanaan	72,41	74,21	76,01	77,81	79,61	81,41	83,21	
			Indeks iklim inklusivitas	68,12	69,52	70,92	72,32	73,72	75,12	76,52	
			Kemampuan literasi	64,8	65,3	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8	
			Kemampuan numerasi	57,73	57,98	58,23	58,48	58,73	58,98	59,23	
			SMALB								
			Kemampuan literasi	60,41	60,91	67,41	61,91	62,41	62,91	63,41	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	Target Tahun						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)								(12)
			Kemampuan numerasi	57,18	57,68	58,18	58,68	59,18	59,68	60,18	
			Indeks iklim keamanan	74	75,3	76,6	77,9	79,2	80,5	81,8	
			Indeks iklim kebencanaan	70,8	72,9	74,8	76,8	78,8	80,9	82,8	
			Indeks iklim inklusivitas	65,2	66,8	68,4	70	71,6	73,2	74,8	
			4. Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik	97,22	98,5	98,75	99	99,25	99,5	100	
			5. Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	3	4	4	4	5	5	5	
			6. Jumlah Siswa yang berprestasi nasional	4	5	6	7	8	9	10	
			7. Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Karakter	Na	100	100	110	120	130	140	
			Jumlah Sekolah Unggulan	Na	Na	1	1	1	1	1	
			8. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	300	325	350	360	370	380	390	
			9. Jumlah Masyarakat yang menerima Beasiswa kuliah	Na	0	0	100	110	120	130	
			10. Jumlah Sekolah yang menerima makanan bergizi	Na	229.537	252.491	275.444	298.398	321.352	344.306	
			11. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	5,88	5,88-11,76	8,82-13,23	11,76-14,70	14,71-16,17	17,65	19,12-20,59	
			12. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	0	0-5,88	1,47-7,35	2,94-8,82	4,41-10,29	5,88-11,76	7,35-13,23	
			13. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	36,67	41,7	47,08	52,46	62,84	73,22	83,6	
			14. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	33,81	43,44	50,52	57,6	64,68	71,76	78,84	
			15. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	n/a	8,88	8,9	8,93	8,95	8,98	9	
			16. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	n/a	74,46	74,98	75,51	76,04	76,56	77,09	

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendataan	Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	Peta Jalan Pendidikan	Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	1 Melanjutkan program sekolah yang berkeadilan dan berkualitas	
2	Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045		2 Meningkatkan sumber daya Pendidikan dan mendorong kurikulum bermuatan lokal	
3	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Asta cita1, 4 dan 8)		3 Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru	
4	Instruksi Kemendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029		4 Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan	
5	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045		5 Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)			

BAB IV
PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja memiliki hirarki dan saling berkaitan. Program adalah kumpulan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran dari program, yang lebih detail dalam mencapai tujuan. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang berisi rincian jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan. Kinerja adalah hasil yang dicapai dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Uraian Program

Uraian Program merujuk pada penjelasan rinci tentang suatu program, termasuk tujuan, kegiatan, target, dan indikator keberhasilan. Penjelasan ini biasanya mencakup informasi tentang apa yang ingin dicapai oleh program, bagaimana program akan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keberhasilan program akan diukur. Poin penting yang biasanya terdapat dalam uraian program:

- a) Tujuan: Apa yang ingin dicapai oleh program. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu (SMART)
- b) Sasaran: Kelompok atau entitas yang menjadi target program.
- c) Kegiatan: Aktivitas-aktivitas spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
- d) Target: Tingkat pencapaian yang ingin diraih untuk setiap kegiatan.
- e) Indikator Keberhasilan: Alat ukur yang digunakan untuk menilai apakah program berhasil mencapai tujuannya
- f) Jadwal: Timeline pelaksanaan kegiatan.

- g) Anggaran: Rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program
- h) Penanggung Jawab: Individu atau tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- i) Metode Pelaksanaan: Pendekatan atau cara yang digunakan untuk melaksanakan program
- j) Evaluasi: Proses penilaian terhadap pelaksanaan program.

Uraian program yang baik harus jelas, mudah dipahami, dan memberikan informasi yang cukup untuk semua pihak yang terlibat. Hal ini penting agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

2. Uraian Kegiatan

Merupakan penjabaran dari program yang lebih spesifik. Kegiatan ini mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program.

3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Uraian sub kegiatan, kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif adalah elemen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran suatu program atau kegiatan. Uraian sub kegiatan menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan. Kinerja mengacu pada hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Indikator adalah alat ukur untuk menilai kinerja. Target adalah capaian yang ingin diraih dari indikator tersebut. Pagu indikatif adalah perkiraan awal anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Uraian Sub Kegiatan

Menjelaskan secara detail setiap langkah atau aktivitas yang termasuk dalam satu kegiatan

b) Kinerja

Merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan

- c) Indikator
Alat ukur untuk menilai kinerja
 - d) Target
Capaian yang ingin diraih dari indikator
 - e) Pagu Indikatif
Perkiraan awal anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan
4. Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- Sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah rincian lebih detail dari suatu kegiatan yang lebih besar, yang bertujuan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program prioritas. Sub kegiatan ini menguraikan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk jenis belanja yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan. Alasan pentingnya Sub Kegiatan:
- a) Sub kegiatan membantu memperjelas langkah-langkah operasional dalam mencapai tujuan program
 - b) Sub kegiatan memastikan bahwa program prioritas dilaksanakan secara efektif dan efisien
 - c) Sub kegiatan memberikan informasi tentang jenis belanja yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan dari setiap kegiatan
 - d) Sub kegiatan mempermudah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
- Dengan demikian, uraian sub kegiatan sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, karena menjadi jembatan antara tujuan besar program dengan tindakan nyata yang akan dilakukan
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah mencakup indikator kinerja, program, dan kegiatan yang terukur, serta realistis untuk dicapai dalam periode waktu tertentu (biasanya 5 tahun). Pencapaian ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target:

- a) Visi dan Misi: Tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh perangkat daerah
 - b) Analisis Lingkungan: Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah.
 - c) Sumber Daya: Ketersediaan anggaran, tenaga ahli, dan sarana prasarana yang diperlukan
 - d) Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah
 - e) Evaluasi dan Monitoring: Proses pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), merupakan cara untuk menilai keberhasilan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKK digunakan sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pembinaan. IKK ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RP-JMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akses dan Layanan Masyarakat	% Angka Partisipasi sekolah	1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (tahun) 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 4.Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 5. Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan dan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus 6. Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan	Capaian Rapor Pendidikan	1. Rata-rata Kemampuan Literasi SMA 2. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMA 3. Rata-rata Kemampuan Literasi SMK 4. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMK 5. Rata-rata Kemampuan Literasi SDLB 6. Rata-rata Kemampuan Numerasi SDLB 7. Rata-rata Kemampuan Literasi SMPLB 8. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMPLB 9. Rata-rata Kemampuani Literasi SMALB 10. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMALB	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan dan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 7. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya Kompetensi PTK dan Kualitas Pembelajaran	1. Persentase Pendidik Berkualifikasi minimal D-IV/S-1 2. Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik 3. Rasio ideal Guru terhadap Siswa	Program Pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan : Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu)Provinsi Sub Kegiatan : 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan dan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 7. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	
Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kompetensi	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran	Capaian Rapor Pendidikan	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan		

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaannya

Bidang Urusan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output (1)	Indikator Outcome/output (2)	Basilare 2024 (3)	2025		2026		2027		Target dan pagu indikator tahun		2028		2029		2030		Ket	
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)		Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)		Pagu (15)		
																	12 PS (16)	PRO SN (17)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang																	
Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Penganggaran Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani				100%													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	22.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	22.000.000	6 Dokumen	24.200.000	6 Dokumen	26.620.000	6 Dokumen	29.282.000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dapatdik)	1 Laporan	1 Laporan	255.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SPM)	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap Kes)	1 Laporan	-		-		1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pendanaan Pendidikan SMA)	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	82.500.000	1 Laporan	90.750.000	1 Laporan	99.825.000	1 Laporan	109.807.500				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pendanaan Pendidikan PKL)	1 Laporan	1 Laporan	417.580.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	82.500.000	1 Laporan	90.750.000	1 Laporan	99.825.000	1 Laporan	109.807.500				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pendanaan Pendidikan)	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	154.000.000	1 Laporan	169.400.000	1 Laporan	186.340.000	1 Laporan	204.974.000				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (MBG)	1 Laporan	1 Laporan	-	0	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani				100%				100%									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.331 orang	14.331 orang	1.829.524.048.000	15.001 orang	1.842.445.754.000	15.001 orang	1.916.143.584.160	15.001 orang	1.954.466.455.843	15.001 orang	1.993.555.784.960	15.001 orang	2.033.426.900.659				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas)	1 Dokumen	1 Dokumen		12 Dokumen	600.000.000	12 Dokumen	660.000.000	12 Dokumen	726.000.000	12 Dokumen	798.600.000	12 Dokumen	878.160.000				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (SKL)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	57.200.000	1 Dokumen	62.920.000	1 Dokumen	69.212.000	1 Dokumen	76.133.200				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (SMA/SMK)	1 Dokumen	1 Dokumen		4 Dokumen	4.233.600.000	4 Dokumen	4.656.960.000	4 Dokumen	5.122.656.000	4 Dokumen	5.634.921.600	4 Dokumen	6.198.413.760				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (PLK)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.113.336.000	4 Dokumen	1.872.000.000	4 Dokumen	2.059.200.000	4 Dokumen	2.265.120.000	4 Dokumen	2.491.632.000	4 Dokumen	2.740.795.200				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (ETIKP)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	302.500.000	1 Dokumen	332.750.000	1 Dokumen	366.025.000				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Outsourcing/Keberhasilan)	1 Dokumen	1 Dokumen		12 Dokumen	648.000.000	12 Dokumen	712.800.000	12 Dokumen	784.080.000	12 Dokumen	862.488.000	12 Dokumen	948.136.800				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Outsourcing/Keuntungan)	1 Dokumen	1 Dokumen		12 Dokumen	588.000.000	12 Dokumen	646.800.000	12 Dokumen	711.480.000	12 Dokumen	782.628.000	12 Dokumen	860.890.800				
Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (PA/KPA/PPTK/SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	275.000.000	4 Dokumen	302.500.000	4 Dokumen	332.750.000	4 Dokumen	366.025.000				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (titahh Kualifikasi)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	990.000.000	1 Dokumen	1.089.000.000	1 Dokumen	1.197.900.000	1 Dokumen	1.317.690.000				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (titahh Kualifikasi Gratis)	-	-		-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000				

Bidang Urutan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikator tahun															Ket 12 PS PRO SN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)					
(1)	(2)	(3)															(16)	(17)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	302.500.000	1 Laporan	332.750.000	1 Laporan	366.025.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Transfer PTK)	1 Laporan	160.660.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	1 Laporan	146.410.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kualifikasi)	1 Laporan		1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	82.500.000	1 Laporan	90.750.000	1 Laporan	99.825.000	1 Laporan	109.807.500						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kualifikasi Gratis)	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	145.200.000	1 Laporan	159.720.000	1 Laporan	175.692.000						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	49750000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	60.500.000	4 Dokumen	66.550.000	4 Dokumen	73.205.000						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administratif perkantoran yang terlayani			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	14.641.000						
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	133.664.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000						
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	115.600.000	-	1 Dokumen	-	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	159.090.260	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	165.000.000	3 Laporan	181.500.000	3 Laporan	199.650.000	3 Laporan	219.615.000						
Pertauisahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pertauisahan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	88.280.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	181.500.000	1 Laporan	199.650.000	1 Laporan	219.615.000						
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	135.000.000						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administratif perkantoran yang terlayani			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000						
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	44.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	82.500.000	1 Laporan	90.750.000	1 Laporan	99.825.000	1 Laporan	109.807.500						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administratif kepegawaian yang terlayani			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	2 Paket	450.000.000	0	0	0	0	2 Paket	450.000.000						
Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	-	-	-	-	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000						
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000						
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Benchmarking Sektir)	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-						
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Bimtek SAKIP)	1 Dokumen	405.145.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	1 Dokumen	19.965.000	1 Dokumen	21.961.500						
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (URP)	1 Dokumen		1 Dokumen	138.000.000	1 Dokumen	151.800.000	1 Dokumen	166.980.000	1 Dokumen	183.678.000	1 Dokumen	202.045.800						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (PKP/PAK/Pelatihan Lainnya)	4 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Uji Kompetensi)	60 orang	350.000.000	60 orang	350.000.000	60 orang	385.000.000	60 orang	423.500.000	60 orang	465.850.000	60 orang	512.435.000						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan Kepala Bekerja)	50 orang	215.000.000	50 orang	215.000.000	50 orang	226.500.000	50 orang	260.150.000	50 orang	286.165.000	50 orang	314.781.500						

Bidang Urusan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output (1)	Indikator Outcome/output (2)	Baseline 2024 (3)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)	12 PS (16)	PRO SN (17)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek ICT/Coding/AI)	100 orang	751 Orang	805.230.000	150 orang	350.000.000	100 orang	385.000.000	100 orang	423.500.000	100 orang	465.850.000	100 orang	512.435.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Pengembangan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan/Coding/AI)	100 orang			150 orang	245.000.000	100 orang	269.500.000	100 orang	296.450.000	100 orang	326.095.000	100 orang	358.704.500		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Aesop)	20 orang			20 orang	249.000.000	20 orang	273.900.000	20 orang	301.290.000	20 orang	331.419.000	20 orang	364.560.900		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan robotik/Astronomi/IPTEK)	100 orang			100 orang	252.000.000	100 orang	277.200.000	100 orang	304.920.000	100 orang	335.412.000	100 orang	368.953.200		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum yang terlayani				100%		100%		100%		100%		100%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		84.000.000	15 Paket	86.980.000	15 Paket	95.678.000	15 Paket	105.245.800	15 Paket	115.770.380	15 Paket	127.347.418		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	-	4 Paket	175.000.000	4 Paket	175.000.000	4 Paket	175.000.000	4 Paket	175.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK)	1 Paket		1 Paket	4 Paket	150.000.000	4 Paket	165.000.000	4 Paket	181.500.000	4 Paket	199.650.000	4 Paket	219.615.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Konsumsi)	1 Paket		382.500.000	12 Paket	125.000.000	12 Paket	137.500.000	12 Paket	151.250.000	12 Paket	166.375.000	12 Paket	183.012.500		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Publikasi)	1 Paket		1 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	110.000.000	2 Paket	121.000.000	2 Paket	133.100.000	2 Paket	146.410.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		105.210.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	165.000.000	2 Paket	181.500.000	2 Paket	199.650.000	2 Paket	219.615.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	-	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	-	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	115.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		113.500.000	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	214.500.000	1 Laporan	235.950.000	1 Laporan	259.545.000	1 Laporan	285.499.500		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi pektantoran yang terlayani				100%		100%		100%		100%		100%			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	-	3 Unit	1.500.000.000	-	-	5 Unit	175.000.000	-	-		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	-	-	-	1 Unit	350.000.000	-	-	-	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket					3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			-	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-			-	-	200 Unit	10.000.000	200 Unit	20.000.000	200 Unit	20.000.000	200 Unit	20.000.000		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-			-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dinas/UPRD)	-			-	-	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	0	0	1 Unit	1.000.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dinas)	1 Unit		271.000.000,0	4 Unit	340.000.000	4 Unit	374.000.000	4 Unit	411.400.000	4 Unit	452.540.000	4 Unit	497.794.000		

Bidang Urusan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikator tahun															Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS (16)	PRO SN (17)			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	3 Ruang	-	-	-	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	PS	PRO SN		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	0	2 Ruang	899.594.000	-	-	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	3 Ruang	1.053.500.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	0	-	-	-	-	1 Ruang	500.000.000	1 Ruang	500.000.000	1 Ruang	500.000.000	1 Ruang	500.000.000	1 Ruang	500.000.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	0	-	-	-	-	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	10 Unit	5 Unit	1.134.147.660	5 Unit	1.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas Sekolah yang Telah direhab (DAK/APBD)	25 ruang	17 Ruang	3.348.488.638	8 Ruang	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Guru/TU	Jumlah Ruang Guru/TU yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	1 Ruang	4 Ruang	1.841.183.988	-	-	4 Ruang	1.841.183.988	4 Ruang	1.841.183.988	4 Ruang	1.841.183.988	4 Ruang	1.841.183.988	4 Ruang	1.841.183.988	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (APBD/DAK)	3 Ruang	3 Ruang	882.750.000	-	-	3 Ruang	882.750.000	3 Ruang	882.750.000	3 Ruang	882.750.000	3 Ruang	882.750.000	3 Ruang	971.025.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Seding/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Seding/berat (DAK/APBD)	N/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	PRO SN	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (DAK/APBD)	1008 Paket	1008 Paket	1.845.623.988	1008 Paket	1.845.623.988	1008 Paket	1.845.623.988	1008 Paket	1.845.623.988	1008 Paket	1.845.623.988	1008 Paket	1.845.623.988	1008 Paket	1.845.623.988	-	-	
Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia (Alat Kesehatan) (DAK/APBD)	5 Paket	7 Paket	1.176.226.038	-	-	5 Paket	500.000.000	5 Paket	550.000.000	5 Paket	605.000.000	5 Paket	665.500.000	5 Paket	665.500.000	-	-	
Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia (Alat olahraga) (DAK/APBD)	5 Paket	-	-	-	-	5 Paket	250.000.000	5 Paket	275.000.000	5 Paket	302.500.000	5 Paket	332.750.000	5 Paket	332.750.000	-	-	
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Kelengkapan sekolah peserta didik) (DAK/APBD)	N/a	-	-	1000 Paket	250.000.000	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000	-	-	
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (tas/buku dan kelengkapan lainnya) (DAK/APBD)	N/a	-	-	-	-	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000	-	-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (DAK/APBD)	8 Paket	10 Paket	2.826.621.000	10 Paket	2.826.621.000	10 Paket	3.109.283.100	10 Paket	3.420.211.410	10 Paket	3.762.232.551	10 Paket	4.138.455.806	10 Paket	4.138.455.806	PS	PRO SN	
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (DAK/APBD)	N/a	-	-	-	-	5 Unit	725.000.000	5 Unit	725.000.000	5 Unit	725.000.000	5 Unit	725.000.000	5 Unit	725.000.000	PS	PRO SN	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Negeri)	172.958 siswa	172.958 siswa	186.991.645.250	172.958 siswa	119.856.581.000	172.958 siswa	131.842.239.100	172.958 siswa	145.026.463.010	172.958 siswa	159.529.109.311	172.958 siswa	175.482.020.242	172.958 siswa	175.482.020.242	PS	PRO SN	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Swasta)	51.073 siswa	51.073 siswa	-	51.073 siswa	67.448.886.000	51.073 siswa	74.193.774.600	51.073 siswa	81.613.152.060	51.073 siswa	89.774.467.266	51.073 siswa	98.751.913.993	51.073 siswa	98.751.913.993	PS	PRO SN	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Kartus Cerdas Sumel)	N/a	-	-	-	-	1000 siswa	500.000.000	1000 siswa	500.000.000	1000 siswa	500.000.000	1000 siswa	500.000.000	1000 siswa	500.000.000	PS	PRO SN	

Bidang Urusan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Estimasi 2024	Target dan pagu indikator tahun												Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS (16)	PRO SN (17)
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (FLS3M)	234 Peserta Didik	234 Peserta Didik	606.072.500	234 Peserta Didik	666.679.750	234 Peserta Didik	733.347.725	234 Peserta Didik	806.682.498	234 Peserta Didik	887.350.747	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (OZSN)	360 Peserta Didik	360 Peserta Didik	-	-	360 Peserta Didik	-	360 Peserta Didik	-	360 Peserta Didik	-	360 Peserta Didik	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (OSN)	404 Peserta Didik	404 Peserta Didik	300.000.000	404 Peserta Didik	330.000.000	404 Peserta Didik	363.000.000	404 Peserta Didik	399.300.000	404 Peserta Didik	439.230.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (OTRSI)	404 Peserta Didik	0	186.170.000	404 Peserta Didik	330.000.000	404 Peserta Didik	363.000.000	404 Peserta Didik	399.300.000	404 Peserta Didik	439.230.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (FKSIS)	404 Peserta Didik	0		404 Peserta Didik	330.000.000	404 Peserta Didik	363.000.000	404 Peserta Didik	399.300.000	404 Peserta Didik	439.230.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (gerdaa cermat SMA)	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik		100 Peserta Didik	-	100 Peserta Didik	-	100 Peserta Didik	-	100 Peserta Didik	-	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Internal dan Numerasi)	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	97.970.000	100 Peserta Didik	107.767.000	100 Peserta Didik	118.543.700	100 Peserta Didik	130.398.070	100 Peserta Didik	143.437.877	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Kreatifitas dan Inovasi)	468 Peserta Didik	468 Peserta Didik	212.055.000	468 Peserta Didik	233.260.500	468 Peserta Didik	256.586.550	468 Peserta Didik	282.245.205	468 Peserta Didik	310.469.726	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Bahaya laten, HIV AIDS dan Narkoba)	100 siswa	-		100 siswa	150.000.000	100 siswa	150.000.000	100 siswa	150.000.000	100 siswa	150.000.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Pendidikan Karakter)	-	-	234 Peserta Didik	186.170.000	234 Peserta Didik	204.787.000	234 Peserta Didik	225.265.700	234 Peserta Didik	247.792.270	272.571.497	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Pelatihan Raket/Robot)	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	202.000.000	500 Peserta Didik	222.200.000	500 Peserta Didik	244.420.000	500 Peserta Didik	268.862.000	500 Peserta Didik	295.748.200	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Lomba Raket air dan Robokik)	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	289.000.000	500 Peserta Didik	317.900.000	500 Peserta Didik	349.690.000	500 Peserta Didik	384.659.000	500 Peserta Didik	423.124.900	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Lomba khilafat)	N/a	-	-	50 Peserta Didik	-	50 Peserta Didik	-	50 Peserta Didik	-	50 Peserta Didik	-	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Lomba khalafat)	100 Peserta Didik	-	-	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peningkatan Media Pembelajaran siswa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Lomba 1C7)	100 Peserta Didik	-	-	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peralaga Siswa yang Tersedia	N/a	-	-	250 Paket	375.000.000	250 Paket	375.000.000	250 Paket	375.000.000	250 Paket	375.000.000	PS	PRO SN		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	N/a	-	-	250 Orang	150.000.000	250 Orang	150.000.000	250 Orang	150.000.000	250 Orang	150.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pungkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Deep learning)	150	-	0	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pungkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (PRG)	150	-	353 orang	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pungkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Gurprek)	150	-	50 Orang	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pungkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Refleksi)	150	-	50 Orang	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN		

Bidang Urutan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun														Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)	12 PS (16)	PRO SN (17)		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Ukron)	150	-	-	50 Orang	131.467.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Jabatan Fungsional)	150	-	-	50 Orang	132.399.046	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pelatihan Guru BK dan Ke-Bk-AN)	150	-	0	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pelatihan Lulusan)	150	-	0	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi(Kompetensi PTK)	50 Orang	-	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	PS	PRO SN	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pengembangan Profesi PTK)	50 Orang	-	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	PS	PRO SN	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pengembangan Profesi (Karya Tulis Ilmiah)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kematan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pengembangan Profesi (Karya Tulis Ilmiah)	50 Orang	-	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	50 Orang	129.000.000	PS	PRO SN	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (SMA Sumel)	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	14.912.852.100	1 Satuan Pendidikan	13.000.000.000	1 Satuan Pendidikan	14.300.000.000	1 Satuan Pendidikan	15.730.000.000	1 Satuan Pendidikan	17.303.000.000	1 Satuan Pendidikan	19.033.300.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (SMA Religi)	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	-	1.500.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.650.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.815.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.996.500.000	1 Satuan Pendidikan	2.196.150.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Sekolah Sehat, sekolah eselhytel)	N/a	-	0	-	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Sekolah Unggulan)	N/a	-	-	-	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	PS	PRO SN			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Negeri)	172.958 siswa	172.958 siswa	336.690.320.000	172.958 siswa	266.832.110.000	172.958 siswa	266.832.110.000	172.958 siswa	266.832.110.000	172.958 siswa	266.832.110.000	172.958 siswa	266.832.110.000	PS	PRO SN		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Swasta)	51.073 siswa	51.073 siswa	-	69.858.210.000	51.073 siswa	69.858.210.000	51.073 siswa	69.858.210.000	51.073 siswa	69.858.210.000	51.073 siswa	69.858.210.000	PS	PRO SN			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	627 orang	627 orang	87.000.000	100.000.000	627 orang	110.000.000	627 orang	121.000.000	627 orang	133.100.000	627 orang	146.410.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	N/a	-	-	-	-	150 orang	175.000.000	150 orang	192.500.000	150 orang	211.750.000	150 orang	232.925.000	PS	PRO SN		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Pengembangan TIK)	N/a	-	-	-	-	50 Peserta Didik	236.896.000	50 Peserta Didik	260.585.600	50 Peserta Didik	286.644.160	50 Peserta Didik	315.308.576	PS	PRO SN		
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	N/a	-	-	-	-	1 Kcg	125.000.000	1 Kcg	137.500.000	1 Kcg	151.250.000	1 Kcg	166.375.000	PS	PRO SN		
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	N/a	-	-	-	-	637 Orang	220.000.000	627 orang	242.000.000	627 orang	266.200.000	627 orang	292.820.000	PS	PRO SN		

/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket						
		(1)	(2)	(3)	Target	Pagu	(5)	Target	Pagu	(7)	Target	Pagu	(9)	Target	Pagu		(11)	Target	Pagu	(13)	Target	Pagu
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dan Penilaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	N/a	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	PS	PRO SN						
Penyediaan Layanan Pendidikan dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	N/a	-	-	-	-	Komunitas	150.000.000	Komunitas	165.000.000	Komunitas	181.500.000	Komunitas	199.650.000	PS	PRO SN						
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	N/a	1 Keg	42.825.000,00	1 Keg	75.000.000	1 Keg	82.500.000	1 Keg	90.750.000	1 Keg	99.825.000	1 Keg	109.807.500	PS	PRO SN						
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (APBD/DAK)	N/a	-	-	-	-	5 Unit	725.000.000	5 Unit	797.500.000	5 Unit	877.250.000	5 Unit	964.975.000	PS	PRO SN						
Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	N/a	-	-	1 Asrama	4.500.000.000	1 Asrama	4.950.000.000	1 Asrama	5.445.000.000	1 Asrama	5.989.500.000	1 Asrama	6.588.450.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	N/a	-	33.510.000,00	-	-	10 Ruang	3.570.000.000	10 Ruang	3.570.000.000	10 Ruang	3.570.000.000	10 Ruang	3.570.000.000	PS	PRO SN						
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (APBD/DAK)	N/a	2 Ruang	323.500.000,00	-	-	6 Ruang	1.658.250.000	6 Ruang	1.658.250.000	6 Ruang	1.658.250.000	6 Ruang	1.658.250.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (APBD/DAK)	10 Ruang	11 Ruang	4.053.275.138	14 Ruang	4.480.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	PS	PRO SN						
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	N/a	-	-	-	-	50 Orang	125.000.000	50 Orang	137.500.000	50 Orang	151.250.000	50 Orang	166.375.000	PS	PRO SN						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Rerata Kompetensi Literasi SMK 2. Rerata Kompetensi Numerasi SMK 3. Penerimaan Lulusan SMK yang terampil kerja 4. Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK 5. Indeks Iklim Keamanan SMK 6. Indeks Iklim Kesehatan SMK 7. Indeks Inovativitas SMK				1. 100% 2. 62,46 3. 53,00 4. 82,59 5. 79,10 6. 86,09 7. 85,38 8. 82,31 9. 79,00				1. 100% 2. 62,46 3. 53,00 4. 82,59 5. 79,10 6. 86,09 7. 85,38 8. 82,31 9. 79,00													
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Na	-	-	-	-	2 Unit	6.000.000.000	2 Unit	6.000.000.000	2 Unit	6.000.000.000	2 Unit	6.000.000.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	3 Ruang	1 Ruang	1.444.500.000	-	-	3 Ruang	2.272.500.000	3 Ruang	2.272.500.000	3 Ruang	2.272.500.000	3 Ruang	2.272.500.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	25 Ruang	3 Ruang	2.789.186.850	-	-	3 Ruang	3.636.000.000	3 Ruang	3.636.000.000	3 Ruang	3.636.000.000	3 Ruang	3.636.000.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Labor yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	11 Ruang	-	-	-	-	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	5 Ruang	1.250.000.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	3 Ruang	-	-	-	-	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	4 Ruang	-	-	-	-	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	Na	-	-	-	-	1 Ruang	-	1 Ruang	500.000.000	1 Ruang	550.000.000	1 Ruang	603.000.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	Na	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.100.000.000	1 Unit	1.210.000.000	PS	PRO SN						
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	10 Unit	20 Unit	2.019.596.750	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	PS	PRO SN						
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (DAK/APBD)	Na	1 Ruang	1.367.500.000,00	-	-	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	PS	PRO SN						
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (DAK/APBD)	1 Ruang	-	-	-	-	5 Ruang	1.375.000.000	5 Ruang	1.375.000.000	5 Ruang	1.375.000.000	5 Ruang	1.375.000.000	PS	PRO SN						
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (DAK/APBD)	Na	-	-	-	-	5 Ruang	1.375.000.000	5 Ruang	1.375.000.000	5 Ruang	1.375.000.000	5 Ruang	1.375.000.000	PS	PRO SN						
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (DAK/APBD)	1080 Paket	1080 Paket	1.876.270.000	1080 Paket	1.876.270.000	1080 Paket	1.876.270.000	1080 Paket	1.876.270.000	1080 Paket	1.876.270.000	1080 Paket	1.876.270.000	PS	PRO SN						
Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia (DAK/APBD)	Na	10 Paket	639.515.000	-	-	5 Paket	133.875.000	5 Paket	133.875.000	5 Paket	133.875.000	5 Paket	133.875.000	PS	PRO SN						
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (DAK/APBD)	Na	-	-	750 Paket	187.500.000,00	10 Paket	2.211.000.000	10 Paket	2.432.100.000	10 Paket	2.675.310.000	10 Paket	2.942.841.000	PS	PRO SN						
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (DAK/APBD) (serangan+atribut)	Na	-	-	-	-	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000	2000 paket	740.000.000								

Bidang Urusan			Target dan pagu indikator tahun												Ket	
/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS	PRO SN
(1)	(2)	(3)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	(16)	(17)
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (DAK/APBD) (Tas-buku dan perlengkapan lainnya)	Na	-	-	-	-	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000	2000 paket	540.000.000		
Pengadaan Alat Praktik dan Peralaga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peralaga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	41.124.000.000	20 Paket	41.124.000.000	20 Paket	20.000.000.000	20 Paket	20.000.000.000	20 Paket	20.000.000.000	20 Paket	20.000.000.000		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menertima Biaya Personil Peserta Didik (Megej)	79.370 siswa	79.370 siswa	107.448.886.000	79.370 siswa	107.448.886.000	79.370 siswa	118.193.774.600	79.370 siswa	130.013.152.060	79.370 siswa	143.014.467.266	79.370 siswa	157.315.913.993		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menertima Biaya Personil Peserta Didik (Swasta)	46.626 siswa	46.626 siswa	63.448.886.000	46.626 siswa	63.448.886.000	46.626 siswa	69.793.774.600	46.626 siswa	76.773.152.060	46.626 siswa	84.450.467.266	46.626 siswa	92.893.513.993		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menertima Biaya Personil Peserta Didik (Kartu Cerdas Sumsei)	Na	-	-	-	-	500 Siswa	250.000.000	500 Siswa	250.000.000	500 Siswa	250.000.000	500 Siswa	250.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (FLS3N)	600 Peserta Didik	-	-	-	-	600 Peserta Didik	900.000.000	600 Peserta Didik	900.000.000	600 Peserta Didik	900.000.000	600 Peserta Didik	900.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Q2SN)	360 Peserta Didik	360 Peserta Didik	567.065.000	360 Peserta Didik	567.065.000	360 Peserta Didik	540.000.000	360 Peserta Didik	540.000.000	360 Peserta Didik	540.000.000	360 Peserta Didik	540.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (LKS)	404 Peserta Didik	404 Peserta Didik	750.000.000	404 Peserta Didik	750.000.000	404 Peserta Didik	606.000.000	404 Peserta Didik	606.000.000	404 Peserta Didik	606.000.000	404 Peserta Didik	606.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Pikel)	234 Peserta Didik	0	-	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (LCC)	100 Peserta Didik	0	-	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Literasi dan Numerasi)	100 Peserta Didik	1000 Siswa	1.771.365.000	100 Peserta Didik	97.970.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Kefitnes dan Inovasi)	234 Peserta Didik	234 Peserta Didik	262.035.000	234 Peserta Didik	262.035.000	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000	234 Peserta Didik	351.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Kewirausahaan)	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (pendidikan Karakter)	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	186.170.000	100 Peserta Didik	186.170.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Coding/AI)	N/a	-	-	100 Peserta Didik	300.000.000	100 Peserta Didik	300.000.000	100 Peserta Didik	300.000.000	100 Peserta Didik	300.000.000	100 Peserta Didik	300.000.000		
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Bahaya Laren, HIV AIDS dan Narkoba)	N/a	-	-	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000	100 Peserta Didik	150.000.000		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	N/a	-	-	105 Orang	150.000.000	105 Orang	150.000.000	105 Orang	165.000.000	105 Orang	181.500.000	105 Orang	199.650.000		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pelatihan Kenalan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Aksesor)	150 Orang	150 Orang	358.413.000,00	52 Orang	294.225.000	80 Orang	323.647.500	80 Orang	356.012.250	80 Orang	391.613.475	80 Orang	430.774.823		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Ketrusahan)	150 Orang	40 Orang	100.000.000	80 Orang	100.000.000	80 Orang	110.000.000	80 Orang	121.000.000	80 Orang	133.100.000	80 Orang	146.410.000		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Deep learning)	150	-	-	200	-	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (PRO)	150	-	-	250	-	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000		

Bidang Urutan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikator tahun												Ket		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS PRO SN	PRO SN	
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Gurupel)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Beldekel)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (0Bkon)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Jabatan Fungsional)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pelatihan Guru BK dan Ke-Bk-AN)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pelatihan Lirum)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangkan dan Manajemen (SMK Religi)	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	-	1.500.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.500.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.650.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.815.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.996.500.000	1 Satuan Pendidikan	2.196.150.000	PS	PRO SN
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangkan dan Manajemen (BKRI)	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	-	100.000.000	50 Satuan Pendidikan	100.000.000	50 Satuan Pendidikan	110.000.000	50 Satuan Pendidikan	121.000.000	50 Satuan Pendidikan	133.100.000	50 Satuan Pendidikan	146.410.000	PS	PRO SN
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangkan dan Manajemen (SMK PK)	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	-	25.000.000	5 Satuan Pendidikan	25.000.000	5 Satuan Pendidikan	27.500.000	5 Satuan Pendidikan	30.250.000	5 Satuan Pendidikan	33.275.000	5 Satuan Pendidikan	36.602.500	PS	PRO SN
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangkan dan Manajemen (Sekolah Sehat)	N/a	-	-	-	20 Satuan Pendidikan	-	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	20 Satuan Pendidikan	200.000.000	PS	PRO SN
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangkan dan Manajemen (LSP)	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	-	100.000.000	40 Satuan Pendidikan	100.000.000	40 Satuan Pendidikan	110.000.000	40 Satuan Pendidikan	121.000.000	40 Satuan Pendidikan	133.100.000	40 Satuan Pendidikan	146.410.000	PS	PRO SN
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangkan dan Manajemen (SMK Unggulan)	-	-	-	-	1 Satuan Pendidikan	-	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	1 Satuan Pendidikan	1.260.000.000	PS	PRO SN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Negent)	79.370 siswa	79.370 siswa	-	126.271.086.000	121 Satuan Pendidikan	126.271.086.000	121 Satuan Pendidikan	138.898.194.600	121 Satuan Pendidikan	152.788.014.060	121 Satuan Pendidikan	168.066.815.466	121 Satuan Pendidikan	184.873.497.013		
Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Swasta)	46.626 siswa	46.626 siswa	-	72.419.970.000	202 Satuan Pendidikan	72.419.970.000	202 Satuan Pendidikan	79.661.967.000	202 Satuan Pendidikan	87.628.163.700	202 Satuan Pendidikan	96.390.980.070	202 Satuan Pendidikan	106.030.078.077		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	323 Orang	323 Orang	-	100.000.000	323 Orang	100.000.000	323 Orang	110.000.000	323 Orang	121.000.000	323 Orang	133.100.000	323 Orang	146.410.000		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	N/a	-	-	-	100 Orang	-	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	121.000.000	100 Orang	133.100.000	PS	PRO SN
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	N/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	82.500.000	PS	PRO SN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	N/a	-	-	-	100 Orang	-	100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	121.000.000	100 Orang	133.100.000	PS	PRO SN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	N/a	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	PS	PRO SN
Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	N/a	-	-	-	50 Orang	-	50 Orang	75.000.000	50 Orang	82.500.000	50 Orang	90.750.000	50 Orang	99.825.000	PS	PRO SN

Bidang Urusan /Program/Output/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikator tahun												Ket		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	12 PS (16)	PRO SN (17)	
Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	N/a	-	-	-	-	5 Komunitas	65.000.000	5 Komunitas	71.500.000	5 Komunitas	78.650.000	5 Komunitas	86.515.000	PS	PRO SN	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penundungan, kekerasan, dan intoleransi	N/a	-	-	-	-	1 Kegiatan	115.000.000	1 Kegiatan	126.500.000	1 Kegiatan	139.150.000	1 Kegiatan	153.065.000	PS	PRO SN	
Facilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	N/a	-	-	-	-	25 orang	50.000.000	25 orang	55.000.000	25 orang	60.500.000	25 orang	66.550.000	PS	PRO SN	
Relabilitas sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/a	-	-	-	-	25 Paket	1.136.250.000	25 Paket	1.136.250.000	25 Paket	1.136.250.000	25 Paket	1.136.250.000	PS	PRO SN	
Relabilitas Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi (APBD/DAK)	N/a	-	-	-	-	5 Ruang	1.767.500.000	5 Ruang	1.767.500.000	5 Ruang	1.767.500.000	5 Ruang	1.767.500.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (APBD/DAK)	10 Ruang	8 Ruang	2.300.287.200	-	-	12 Ruang	4.242.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	12 Ruang	4.242.000.000	PS	PRO SN	
Relabilitas sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	N/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Ruang	125.000.000	1 Ruang	137.500.000	PS	PRO SN	
Relabilitas sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (APBD/DAK)	12 Ruang	12 Ruang	2.095.582.350	4 Ruang	810.000.000	4 Ruang	891.000.000	4 Ruang	980.100.000	4 Ruang	1.078.110.000	4 Ruang	1.185.921.000	PS	PRO SN	
Relabilitas sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	N/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	350.000.000	1 Unit	385.000.000	PS	PRO SN	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	N/a	-	-	-	-	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	PS	PRO SN	
Relabilitas sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (APBD/DAK)	-	-	-	-	-	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	PS	PRO SN	
Pengelolaan Pendidikan Khusus	1. Jumlah Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi 2. Persentase Penduduk usia 14-18 terlayani di pendidikan Menengah 3. Rerata kompetensi Literasi SDLB 4. Rerata kompetensi Numerasi SDLB 5. Rerata kompetensi Literasi SMPJB 6. Rerata kompetensi Numerasi SMPJB 7. Rerata kompetensi Literasi SMPJB 8. Rerata kompetensi Numerasi SMPJB 9. Rerata kompetensi Literasi SMA/ALB 10. Rerata kompetensi Numerasi SMA/ALB 11. Indeks Iklim Keamanan SDLB 12. Indeks Inklusi SDLB 13. Indeks Iklim Keamanan SMPJB 14. Indeks Iklim Keamanan SMPJB 15. Indeks Inklusi SMPJB 16. Indeks Iklim Keamanan SMA/ALB 17. Indeks Iklim Keamanan SMA/ALB 18. Indeks Inklusi SMA/ALB	1. 96 Sek 2. 100% 3. 62,89 4. 62,89 5. 48,61 6. 62,56 7. 56,53 8. 57,56 9. 52,47 10. 86,63 11. 93,07 12. 81,45 13. 77,51 14. 72,91 15. 82,31 16. 78,32 17. 67,74 18. 79,98	1. 96 Sek 2. 100% 3. 62,89 4. 62,89 5. 48,61 6. 62,56 7. 56,53 8. 57,56 9. 52,47 10. 86,63 11. 93,07 12. 81,45 13. 77,51 14. 72,91 15. 82,31 16. 78,32 17. 67,74 18. 79,98	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	PS	PRO SN
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	-	-	-	-	-	1 Unit	1.750.000.000	1 Unit	1.750.000.000	1 Unit	1.750.000.000	1 Unit	1.750.000.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	-	-	-	-	-	3 Ruang	105.000.000	3 Ruang	105.000.000	3 Ruang	105.000.000	3 Ruang	105.000.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	1 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	-	1 Ruang	-	1 Ruang	-	1 Ruang	-	PS	PRO SN	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	-	-	-	-	-	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1 Ruang	450.000.000	1 Ruang	450.000.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (DAK/APBD)	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1 Ruang	450.000.000	1 Ruang	450.000.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	5 Unit	3 Unit	459.120.000,00	7 Unit	736.106.012	3 Unit	459.120.000,00	3 Unit	459.120.000,00	3 Unit	459.120.000,00	3 Unit	459.120.000,00	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (APBD/DAK)	-	-	-	-	-	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	PS	PRO SN	
Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	3 Ruang	1.060.500.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	-	-	-	-	-	3 Ruang	757.500.000	3 Ruang	757.500.000	3 Ruang	757.500.000	3 Ruang	757.500.000	PS	PRO SN	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (APBD/DAK)	N/a	5000 Paket	840.000.000	-	-	5000 Paket	840.000.000	5000 Paket	840.000.000	5000 Paket	840.000.000	5000 Paket	840.000.000	PS	PRO SN	

/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikator tahun															Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS (16)	PRO SN (17)			
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)					
Pengadaan Perlengkapan Sekolah (1)	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (serangan sekolah) (DAK/AFBD)	5 Paket	5 Paket	312.500.000	-	-	5 Paket	312.500.000	5 Paket	312.500.000	5 Paket	312.500.000	5 Paket	312.500.000					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (tas/buku dan perlengkapan lainnya) (DAK/AFBD)	-	-	-	-	-	1000 paket	357.000.000	1000 paket	357.000.000	1000 paket	357.000.000	1000 paket	357.000.000					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (tas/buku dan perlengkapan lainnya) (DAK/AFBD)	-	-	-	-	-	1000 paket	255.000.000	1000 paket	255.000.000	1000 paket	255.000.000	1000 paket	255.000.000					
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menenerima Biaya Personil Peserta Didik (Meger)	1.889 Peserta Didik	1.889 Peserta Didik	1.889 Peserta Didik	1.850.000.000	1.889 Peserta Didik	2.035.000.000	1.889 Peserta Didik	2.238.500.000	1.889 Peserta Didik	2.462.350.000	1.889 Peserta Didik	2.708.585.000						
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menenerima Biaya Personil Peserta Didik (Swasati)	1.207 Peserta Didik	1.207 Peserta Didik	1.207 Peserta Didik	1.215.041.823	1.207 Peserta Didik	1.336.546.005	1.207 Peserta Didik	1.470.200.606	1.207 Peserta Didik	1.617.220.666	1.207 Peserta Didik	1.778.942.733						
Pengadaan Alat Praktik dan Pengerja Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Pengerja Siswa yang Tersedia	-	5 Paket	300.600.000	5 Paket	229.100.000	5 Paket	252.010.000	5 Paket	277.211.000	5 Paket	304.932.100	5 Paket	335.425.310	PS	PRO SN			
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	5 Unit	757.500.000	5 Unit	757.500.000	5 Unit	757.500.000	5 Unit	757.500.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (FLSSN)	545 Peserta Didik	-	-	-	-	545 Peserta Didik	817.500.000	545 Peserta Didik	817.500.000	545 Peserta Didik	817.500.000	545 Peserta Didik	817.500.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (OSN)	510 Peserta Didik	208 Peserta Didik	1.000.000.000	510 Peserta Didik	765.000.000	510 Peserta Didik	765.000.000	510 Peserta Didik	765.000.000	510 Peserta Didik	765.000.000	510 Peserta Didik	765.000.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (O2SN)	748 Peserta Didik	-	-	-	-	510 Peserta Didik	1.122.000.000	510 Peserta Didik	1.122.000.000	510 Peserta Didik	1.122.000.000	510 Peserta Didik	1.122.000.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (LKS)	0	-	-	-	-	40 Peserta Didik	60.000.000	40 Peserta Didik	60.000.000	40 Peserta Didik	60.000.000	40 Peserta Didik	60.000.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (OPSJ)	0	1182 Peserta Didik	7.599.265.675	-	-	51 Peserta Didik	76.500.000	51 Peserta Didik	76.500.000	51 Peserta Didik	76.500.000	51 Peserta Didik	76.500.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Roda dan popsal)	6084	-	-	-	-	6084 Peserta Didik	12.168.000.000	6084 Peserta Didik	12.168.000.000	6084 Peserta Didik	12.168.000.000	6084 Peserta Didik	12.168.000.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (GSI)	340 Peserta Didik	434 Peserta Didik	2.500.000.000	340 Peserta Didik	250.000.000	340 Peserta Didik	510.000.000	340 Peserta Didik	510.000.000	340 Peserta Didik	510.000.000	340 Peserta Didik	510.000.000	PS	PRO SN			
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Ukcom siswa)	0	-	-	-	-	50 Peserta Didik	150.000.000	50 Peserta Didik	150.000.000	50 Peserta Didik	150.000.000	50 Peserta Didik	150.000.000	PS	PRO SN			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Khusus	0	0	-	-	-	0	-	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	PS	PRO SN			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Inklus)	150 Orang	75 Orang	200.000.000	150 Orang	450.000.000	150 Orang	450.000.000	150 Orang	450.000.000	150 Orang	450.000.000	150 Orang	450.000.000	PS	PRO SN			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Ukcom)	0	20 Orang	110.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	PS	PRO SN			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Deep learning)	150	-	-	-	-	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	PS	PRO SN			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Prc)	150	-	-	-	-	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	PS	PRO SN			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Guprcs)	150	-	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Refleksi)	150	-	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN			

Bidang Urutan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan output	Indikator Outcome/output	Baseline 2024	Target dan pagu indikator tahun														Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Jabatan Fungsional)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pelatihan Guru BK dan Ke-Bk-AN)	150	-	-	-	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	PS	PRO SN	
Pembinaan Kembangan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kembangan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	7.237.255.500	1 Satuan Pendidikan	8.500.000.000	1 Satuan Pendidikan	9.350.000.000	1 Satuan Pendidikan	10.285.000.000	1 Satuan Pendidikan	11.313.500.000	1 Satuan Pendidikan	12.444.850.000	PS	PRO SN		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Negeri)	1.889 Peserta Didik	1.889 Peserta Didik	12.065.700.000	1.889 Peserta Didik	6.612.100.000	1.889 Peserta Didik	7.273.310.000	1.889 Peserta Didik	8.000.641.000	1.889 Peserta Didik	8.800.705.100	1.889 Peserta Didik	9.680.775.610	PS	PS		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Swasta)	1.207 Peserta Didik	1.207 Peserta Didik	5.453.600.000	1.207 Peserta Didik	5.453.600.000	1.207 Peserta Didik	5.998.960.000	1.207 Peserta Didik	6.598.856.000	1.207 Peserta Didik	7.258.741.600	1.207 Peserta Didik	7.984.615.760	PS	PS		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	39 Orang	39 Orang	64.500.000	39 Orang	100.000.000	39 Orang	110.000.000	39 Orang	121.000.000	39 Orang	133.100.000	39 Orang	146.410.000	PS	PRO SN		
Pembinaan PenggunaanTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	N/a	-	-	-	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	PS	PRO SN	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	N/a	-	-	-	1 Konten digital	150.000.000	1 Konten digital	150.000.000	1 Konten digital	150.000.000	1 Konten digital	150.000.000	1 Konten digital	150.000.000	PS	PRO SN	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	N/a	-	-	-	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	PS	PRO SN	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	N/a	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	PS	PRO SN	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	N/a	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	PS	PRO SN	
Facilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	N/a	50 Orang	81.100.000	50 Orang	107.500.000	50 Orang	118.250.000	50 Orang	130.075.000	50 Orang	143.082.500	50 Orang	157.390.750	PS	PRO SN		
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penundungan, kekerasan, dan intoleransi	N/a	-	-	-	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000			
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	N/a	-	-	-	2 Unit	909.000.000	2 Unit	909.000.000	2 Unit	909.000.000	2 Unit	909.000.000	2 Unit	909.000.000			
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	N/a	-	-	-	6 Unit	757.000.000	6 Unit	757.000.000	6 Unit	757.000.000	6 Unit	757.000.000	6 Unit	757.000.000			
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah (APBD/DAK)	5 Ruang	10 Ruang	937.120.000	5 Ruang	640.000.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000	5 Ruang	1.262.500.000				
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	-	-	-	-	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000			
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi (APBD/DAK)	-	2 Unit	996.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS	PRO SN		
Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	-	-	-	-	2 Unit	505.000.000	2 Unit	505.000.000	2 Unit	505.000.000	2 Unit	505.000.000	2 Unit	505.000.000	PS	PRO SN	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (DAK/APBD)	-	1 Ruang	365.920.000	-	-	1 Ruang	350.000.000	1 Ruang	350.000.000	1 Ruang	350.000.000	1 Ruang	350.000.000	PS	PRO SN		
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat (DAK/APBD)	6 Ruang	4 Ruang	445.020.000	-	-	4 Ruang	445.020.000	4 Ruang	445.020.000	4 Ruang	445.020.000	4 Ruang	445.020.000	PS	PRO SN		
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	-	-	-	2 Ruang	505.000.000	2 Ruang	505.000.000	2 Ruang	505.000.000	2 Ruang	505.000.000	2 Ruang	505.000.000	PS	PRO SN	

Bidang Urusan /Program/Outcome/Kegiatan/Sub kegiatan output (1)	Indikator Outcome/output (2)	Baseline 2024 (3)	Target dan pagu indikator tahun												Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		12 PS (16)	PRO SN (17)
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	Target (14)	Pagu (15)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah pengembangan Kurikulum	1 Kurikulum			1 Kurikulum		1 Kurikulum		1 Kurikulum		1 Kurikulum		1 Kurikulum			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun															
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang			50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000		
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	130 Orang			50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000	50 Orang	119.450.000		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	78 Orang	114.103.000	50 Orang	119.450.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK berkualifikasi S-1				98%		98%		98%		98%		98%			
Peminatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi																
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Kompleksi PTK)	1 Dokumen	1 Dokumen	583.860.000	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
Penataan Penyaluran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Penyaluran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penataan Penyaluran Pendidik dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	884.950.000	1 Dokumen	258.843.300	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000		
TOTAL				2.868.880.713.669		2.868.878.713.669		3.091.535.818.491		3.200.829.507.310		3.318.806.485.276		3.444.479.789.709		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan dan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus 6. Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
2	Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum Kegiatan : 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
3	Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan : Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Provinsi Sub Kegiatan : 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan Akses dan Layanan Masyarakat	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Kegiatan : Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Provinsi Sub Kegiatan : 1. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Menengah dan Pendidikan Khusus 2. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator	Satuan	Target Tahun							Keterangan / (DO)
			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rata-Rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,57	8,65	8,73	8,81	8,89	8,97	9,05	Indikator tujuan Inmen 2/2025
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,64	12,67	12,71	12,74	12,77	12,81	12,84	Indikator tujuan Inmen 2/2025
3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	5,88	5,88-11,76	8,82-13,23	11,76-14,70	14,71-16,17	17,65	19,12-20,59	Indikator RPJPD
4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	0-5,88	1,47-7,35	2,94-8,82	4,41-10,29	5,88-11,76	7,35-13,23	Indikator RPJPD
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	36,67	41,70	47,08	52,46	62,84	73,22	83,60	Indikator RPJPD
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	33,81	43,44	50,52	57,6	64,68	71,76	78,84	Indikator RPJPD
7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	80,89	82,54	82,59	83,00	84,29	85,98	87,68	Indikator RPJPD
8	Proporsi persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	n/a	8,88	8,9	8,93	8,95	8,98	9	
9	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	n/a	74,46	74,98	75,51	76,04	76,56	77,09	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline		TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan										
1	Indek Modal Manusia	angka	Na	Na	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58		
2	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)(APS)	%	70,8	100	100	100	100	100	100		
3	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (4-18 Tahun) Penyandang Disabilitas	%	48,95	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah	%	97,86	98,36	98,86	99,36	99,86	100	100		
5	Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah	%	65,06	75,72	80,72	85,72	90,72	95,72	96,02		
6	Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	Sekolah	94	95	96	101	106	111	116		
7	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	%	98,78	100	100	100	100	100	100		
8	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	%	66,12	100	100	100	100	100	100		
9	Jumlah Siswa Miskin yang memperoleh Layanan Pendidikan	Orang	300	300	324	324	324	324	324		
B	Meningkatnya Kualitas Pendidikan										
10	Persentase Akreditasi SLB										
	Akreditasi A	%	10,26	11	13	16	18	20	22		
	Akreditasi B	%	38,46	44	47	49	52	55	58		
	Akreditasi C	%	25,64	25	23	21	19	17	15		
	Akreditasi D/ Tidak Terakreditasi	%	25,64	20	17	14	11	8	5		
11	Persentase Akreditasi Sekolah Menengah										
	Akreditasi A	%	31,25	43	45	47	49	51	53		
	Akreditasi B	%	37,07	38	40	41	42	43	44		
	Akreditasi C	%	21,63	15	13	11	8	6	2		
	Akreditasi D/ Tidak Terakreditasi	%	10,05	4	2	1	1	1	1		
12	Nilai Raport Pendidikan										
	SMA										
	Kemampuan literasi	Nilai	66,93	67,53	68,13	68,73	69,33	69,93	70,53		
	Kemampuan numerasi	Nilai	58,24	59,84	61,44	63,14	64,54	66,24	67,84		
	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,45	79,16	80,36	81,86	82,76	83,96	85,16		
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,01	72,01	73,01	74,01	75,01	76,01	77,01		
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,76	60,26	61,75	63,26	64,75	66,25	67,76		
	SMK										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline		TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Kemampuan literasi	Nilai	65,09	66,39	67,69	68,99	70,29	71,59	72,89		
	Kemampuan numerasi	Nilai	56,82	59,02	61,22	63,42	65,62	67,82	70,02		
	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	80,89	81,46	82,03	82,6	83,18	83,75	84,32		
	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	85,06	85,6	86,14	86,58	87,22	87,76	88,3		
	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,07	70,27	71,47	72,57	73,87	75,07	76,27		
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69,25	70,95	71,85	73,15	74,45	75,75	77,05		
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,03	59,33	61,63	63,93	66,23	68,53	70,83		
	SDLB										
	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,2	76,7	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2		
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,06	71,67	72,57	73,67	74,67	75,67	76,67		
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	67	68,3	69,6	70,9	72,2	73,5	84,8		
	Kemampuan literasi	Nilai	58,06	59,66	61,26	62,86	64,46	66,06	67,66		
	Kemampuan numerasi	Nilai	56,65	57,25	57,85	58,45	59,05	59,65	60,25		
	SMPLB										
	Indeks iklim keamanan	Nilai	69	70,2	71,4	72,6	73,8	75	76,2		
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,41	74,21	76,01	77,81	79,61	81,41	83,21		
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,12	69,52	70,92	72,32	73,72	75,12	76,52		
	Kemampuan literasi	Nilai	64,8	65,3	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8		
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,73	57,98	58,23	58,48	58,73	58,98	59,23		
	SMALB										
	Kemampuan literasi	Nilai	60,41	60,91	67,41	61,91	62,41	62,91	63,41		
	Kemampuan numerasi	Nilai	57,18	57,68	58,18	58,68	59,18	59,68	60,18		
	Indeks iklim keamanan	Nilai	74	75,3	76,6	77,9	79,2	80,5	81,8		
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70,8	72,9	74,8	76,8	78,8	80,9	82,8		
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,2	66,8	68,4	70	71,6	73,2	74,8		
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	5,88	5,88-11,76	8,82-13,23	11,76-14,70	14,71-16,17	17,65	19,12-20,59		
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	0-5,88	1,47-7,35	2,94-8,82	4,41-10,29	5,88-11,76	7,35-13,23		
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi	%	36,67	41,7	47,08	52,46	62,84	73,22	83,6		
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	33,81	43,44	50,52	57,6	64,68	71,76	78,84		

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN								KET.
			Baseline								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
17	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	n/a	8,88	8,9	8,93	8,95	8,98	9		
18	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	80,89	82,54	82,59	83,00	84,29	85,98	87,68		
19	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	n/a	74,46	74,98	75,51	76,04	76,56	77,09		
20	Persentase Peningkatan Kualifikasi pendidik	%	97,22	98,5	98,75	99	99,25	99,5	100		
21	Jumlah Guru bersertifikasi	Orang	10.524	11.420	12.562	13.704	14.846	15.988	17.130		
22	Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	Orang	3	4	4	4	5	5	5		
23	Jumlah Siswa yang berprestasi nasional	Orang	4	5	6	7	8	9	10		
24	Jumlah Siswa yang mengkuti Pembinaan Karakter	orang	Na	100	100	110	120	130	140		
25	Jumlah Sekolah Unggulan	Sekolah	Na	Na	1	1	1	1	1		
26	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Orang	300	325	350	360	370	380	390		
27	Jumlah Masyarakat yang menerima Beasiswa kuliah	Orang	Na	0	0	100	110	120	130		
28	Jumlah siswa yang menerima makanan bergizi	Orang	Na	229.537	252.491	275.444	298.398	321.352	344.306		

BAB V

PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika masyarakat lokal dan global serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan, merupakan hal-hal yang harus disikapi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan di Indonesia umumnya dan Sumatera Selatan khususnya.

Optimalisasi sumber daya lokal berupa; anggaran daerah, sumber daya manusia, nilai/norma kearifan lokal merupakan variabel-variabel yang harus di kalkulasi secara tepat dalam perencanaan pembangunan pendidikan

Berpijak pada hal-hal tersebut di atas, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini disusun secara sistematis dalam kerangka berpikir berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan periode 2025-2029 yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2020-2045

Rencana strategis ini menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan baik secara fisik, maupun non fisik. Renstra ini juga sebagai tolak ukur pencapaian target dan capaian yang akan ditetapkan melalui beberapa indikator-indikator yang sudah tersinkronisasi dengan kebijakan Pusat dan Daerah yang tersusun ke dalam RPJMD dan diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Utama dan Renstra Perangkat Daerah.

Kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pendidikan akan terlihat pada pencapaian indikator yang dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabel, artinya program strategis yang telah disusun akan efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada.

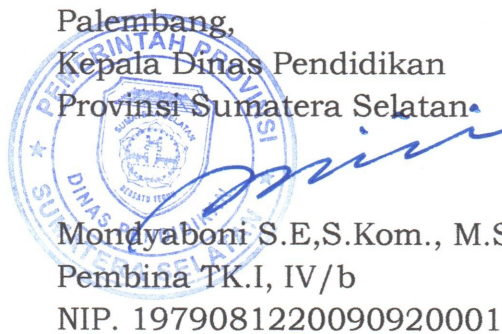
Prinsip efisiensi terkait dengan penggunaan anggaran yang tepat dalam membangun pendidikan, sedangkan prinsip akuntabel bermakna bahwa

program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana strategis ini dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi, hukum dan moralitas

Prinsip efisiensi terkait dengan penggunaan anggaran yang tepat dalam membangun pendidikan, sedangkan prinsip akuntabel bermakna bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana strategis ini dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi, hukum dan moralitas.

Palembang,

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan.



Mondyaboni S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 1979081220090920001